

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

**DINAS
KESEHATAN
PROVINSI
BANTEN**



Jl. Syech Nawawi Al-Bantani
KP3B- Curug Kota Serang

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2023-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan Dokumen LKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP pada dasarnya adalah laporan kinerja pelaksanaan rencana untuk mencapai sasaran indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. LKIP sebagai wujud transparasi dan akuntabilitas Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2024 sesuai dengan dokumen Resntara yaitu 1) Rasio Kematian Bayi dengan target kinerja 4,6 dengan realisasi kinerja sebesar 4,5 atau capaian kinerjanya 102,17%; 2) Rasio Kematian Ibu target 80, realisasi kinerja sebesar 71,7 atau capaian kinerjanya 110,38%; 3) Cakupan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting dengan target 50%, realisasi kinerja sebesar 75% atau capaian kinerjanya 150%; 4) Capaian RSUD Banten Terakreditasi RS Pendidikan dengan target kinerja 92,31%, dengan realisasi kinerja 93,21% atau capaian kinerjanya 100%; dan 5) Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit dengan target kinerja 100%, realisasi kinerja 100% atau capaian kinerjanya 100%.

Realisasi kinerja IKU Dinas Kesehatan pada Tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.133.195.072.570,00 dengan realisasi anggaran sebesar 98,96% atau Rp.1.121.415.728.559,00. Sedangkan target pendapatan tahun 2024 sebesar Rp.223.000.000.000,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.231.063.082.685,00 atau sebesar 103,62%

Demikian Gambaran umum dari laporan ini, semoga dapat bermanfaat dalam penentuan kebijakan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Banten.

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Banten	7
1.5 Isu-Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Banten	24
1.6 Proses Bisnis Dinas Kesehatan Provinsi Banten	25
1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023.....	27
1.8 Sistematika Penulisan	30

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perubahan Rencana Srategis Dinas Kesehatan Tahun 2023–2026	32
2.2 Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan BantenTahun 20234	37
2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024	47

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan	52
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	57
2. Membandingkan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023.....	70
3. Membandingkan Realiasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Dinas Kesehatan	87
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan	

Capaian Kinerja Nasional	89
5. Analisis Penyebab/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	91
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	92
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	94
3.2 Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan	101

BAB 4 PENUTUP	120
4.1 Kesimpulan	120
4.2 Saran dan Rekomendasi	120

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan APBD Tahun 2024
- Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Perubahan APBD Tahun 2024
- Surat Penyataan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Kesehatan Tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten
- Data Capaian IKU Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Sensitif dalam Penurunan Stunting
- Data Capaian IKU Rasio Kematian Ibu dan Rasio Kematian Bayi
- Data Capaian IKU Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan pada UPTD RSUD Banten
- Data Capaian IKU Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit Pada UPTD RSUD Malingping
- Data BPS Usia Harapan Hidup / Angka Harapan Hidup
- Penghargaan Yang Diterima oleh Dinas Kesehatan Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2024 dapat tersusun. Dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan dari penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam melaksanakan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) yang telah dibuat dan Perjanjian Kinerja (Perkin) yang telah ditandatangani.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan motivasi kerja bagi Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Kami menyadari bahwa LKIP ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyusunannya, maka saran dan kritik sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan.

Serang, Maret 2025
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten


Dr. dr. Hj. ATI PRAMUDJI HASTUTI, MARS
NIP.19730815 201001 2 005

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan.....	35
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	36
Tabel 2.3 Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024.....	37
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan	47
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan Tahun 2024	48
Tabel 3.1 Nilai dan Kategori Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	53
Tabel 3.2 Matrik PKO.....	54
Tabel 3.3 Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ..	55
Tabel 3.4 Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO).....	56
Tabel 3.5 Interpretasi Predikat PKO	57
Tabel 3.6 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2024.....	58
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Program Dinas Kesehatan Tahun 2024 65.....	65
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Program UPT RSUD Banten Tahun 2024.....	67
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Program UPT RSUD Malingping Tahun 2024.....	68
Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.....	70
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra 2023-2026.....	87
Tabel 3.12 Angka Harapan Hidup Provinsi Banten Tahun 2020-2024.....	89

Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Indikator Tujuan Daerah dengan Capaian Nasional	90
Tabel 3.14	Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2024	93
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Program Dinas Kesehatan Tahun 2024.....	94
Tabel 3.16	Alokasi Pagu Dinas Kesehatan Tahun 2024	102
Tabel 3.17	Realisasi Belanja Tahun 2024.....	102
Tabel 3.18	Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Tahun 2024..	103

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1	STOK Dinas Kesehatan Provinsi Banten	22
Gambar 2	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Tahun 2023.....	23
Gambar 3	Tenaga Kesehatan di UPTD RSUD Banten dan UPTD RSUD Malingping	24
Gambar 4	Sumber Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta Sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan Kesehatan masyarakat memerlukan Upaya Kesehatan, sumber daya Kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan keberkelanjutan dalam rangka Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan Kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan Kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan Pembangunan nasional.

Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat dalam bentuk promotive, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. Sesuai Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penyelenggara Kesehatan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, Adapun tujuan dari penyelenggaraan Kesehatan adalah: 1)meningkatkan perilaku hidup sehat; 2)menigkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; 3)meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien; 4)memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan; 5)meningkatkan ketahanan Kesehatan dalam menghadapi KLB atau Wabah; 6)menjamin ketersediaan pendanaan Kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif, dan efisien; 7)mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi Kesehatan yang berkelanjutan; dan 8)memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, sumber daya manusia Kesehatan, dan Masyarakat.

Tanggung jawab Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah daerah dalam Pembangunan Kesehatan yaitu: 1)merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangku oleh Masyarakat; 2)meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan; 3)menyelenggarakan kewaspadaan KLB atau Wabah, penganggulangan KLB atau Wabah, dan pasca-KLB atau Wabah; 4)ketersediaan lingkungan yang sehat bagi Masyarakat; 5)ketersediaan Sumber Daya Kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh Masyarakat; 6)ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan; 7)perencanaan, pemenuhan, pendayagunaan, dan kesejahteraan

tenaga pendukung atau penunjang Kesehatan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan wilayahnya, 8)pemberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan; 9)menetapkan kebijakan daerah dan wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria Pembangunan Kesehatan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyusun Rencan Kerja (Renja) yang terdiri atas pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan. Dan diperkuat dengan ditandatanganinya Perjanjian Kinerja (Perkin) untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten atas program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Perjanjian Kinerja.

Penyusunan LKIP merupakan perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu LKIP dapat digunakan sebagai sarana evaluasi untuk menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun mendatang.

LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Banten disusun bertujuan untuk meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan

akuntabel, dan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pembangunan bidang Kesehatan selama tahun 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran oleh setiap instansi pemerintah dalam periode waktu tahun tertentu dengan indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah:

1. Memberikan gambaran kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kesehatan Provinsi Banten secara jelas, transparan, dan akuntabel;
2. Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran selama tahun 2024 yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan;
3. Mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Banten di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat.

Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang harus dicapai pada tahun 2024;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam penerapan azas professional, transparan, dan akuntabel.

1.3 Dasar Hukum

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja, terdapat Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tat Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri PAN RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
14. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
15. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas

dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Banten

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur pelaksana di bidang kesehatan pada Pemerintah Provinsi Banten, yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Banten melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki 6 Unit Pelaksana Tugas (UPTD) yang melaksanakan kegiatan teknis operasional daa/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan, yaitu RSUD Banten, RSUD Malingping, RSUD Labuan, RSUD Cilograng, UPTD Pelatihan Kesehatan, dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) Pasal delapan (8) Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022, Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintergrasi;
3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi;
4. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi;
5. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi;
6. Penerbitan Pengakuan Pedangan Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
7. Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
8. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi;
9. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventik Tingkat Daerah Provinsi; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Dinas Kesehatan;

2. Menetapkan rencana kerja Dinas Kesehatan;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
4. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
5. Merumuskan penyelenggaraan:
 1. Pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat;
 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan;
 3. Sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman;
 4. Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan.
6. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahaan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
7. Menyelenggarakan Pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekratariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
2. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
5. Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, Pelayanan Administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Kesehatan;
6. Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
7. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
8. Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
9. Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
10. Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
11. Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
12. Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

13. Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Menyelenggarakan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan di lingkungan Dinas;
15. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administrative kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Dinas;
16. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawian;

3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 1. Menyususn rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 2. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;

3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
5. Menyelenggarakan, mengedalikan dan mengevaluasi:
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat Daerah Provinsi;
 - b. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah Provinsi.
6. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
7. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administrative dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
8. Menyenggarakan Pengelolaan kinerja, evaluasi dan apelaporan bidang;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:

1. Kepala Seksi Mutu dan Pelayanan Kesehatan Primer; dan
2. Kepala Seksi Mutu dan Pelayanan Kesehatan Rujukan.

4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

- a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan

koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Kerja Strategis Dinas;
- b. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;
- e. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi;
 2. Pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi; dan
 3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi.
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;

- g. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administrative dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Dinas;
- h. Menyelenggarakan Pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:

- 1. Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; dan
- 2. Kepala Seksi Kesehatan Jiwa dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat.

5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- a. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam rangka merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - b. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;

- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;
- e. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
- g. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administrative dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Dinas;
- h. Menyelenggarakan Pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada Bidang; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan,

- 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular; dan
- 2. Kepala Seksi Pengelolaan Imunisasi, Surveilans, Kekarantinaan dan Penyehatan Lingkungan.

6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan

- a. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Startegis Dinas;
- b. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;
- e. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi;
 2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi;
 3. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK); dan
 4. Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;

- g. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administrative dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Bidang; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan membawahkan:

- 1. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- 2. Kepala Seksi Ketahanan Produksi, Distribusi, Pengawasan Alat Kesehatan, Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian.

7. Jabatan Fungsional dan Pelaksana

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Provinsi Banten terdiri atas:

a. UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unit organisasi bersifat khusus atau UOBK pada Dinas Kesehatan yang memberikan layanan secara professional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah serta kepegawaian. Otomoni dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah. UPTD RSUD dipimpin oleh seorang Direktur dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. Pertanggungjawaban dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta

kepegawaian RSUD yang dapat digunakan untuk sinkronisasi pencapaian hasil Pembangunan Kesehatan Daerah.

UPTD RSUD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan pelayanan medis dan nonmedis;
2. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
3. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
5. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
6. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
7. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten diklasifikasikan UPTD RSUD Kelas B, sedangkan UPTD RSUD Malingping, UPTD RSUD Labuan, dan UPTD RSUD Cilograng diklasifikasikan UPTD RSUD Kelas C. Susunan Organisasi UPTD RSUD Kelas B yaitu UPTD RSUD Banten terdiri atas:

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 - Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan; dan
 - Bidang Penunjang Pelayanan;
3. Wakil Direktur Sarana Prasarana, SUmber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan:
 - Bidang Sarana dan Prasarana; dan
 - Bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan.
4. Wakil Direktur Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan, membawahkan:

- Bagian Administrasi, Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.

5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan Organisasi UPTD Kelas C yaitu UPTD RSUD Malingping, UPTD RSUD Labuan, dan UPTD RSUD Cilograng terdiri atas:

1. Direktur;
2. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
3. Bidang Medis;
 - a. Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan; dan
 - b. Seksi Pelayanan Medis dan Gawat Darurat.
4. Bidang Penunjang, membawahkan Seksi Etika, Mutu, Kerjasama dan Pengembangan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

UPTD RSUD membentuk Komite, Satuan Pengawas Internal, dan Instalasi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tentang tata Kelola internal RSUD.

b. UPTD PELATIHAN KESEHATAN

UPTD Pelatihan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. UPTD Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia kesehatan dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPTD;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPTD;
3. Pelaksanaan kerja sama nasional maupun internasional di bidang Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Kesehatan dan Masyarakat;
4. Pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
5. Pengembangan metode dan teknologi pelatihan, pemantauan, evaluasi, sistem informasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
6. Penyiapan pengembangan kemitraan;
7. Pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan; dan
8. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pelaporan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD, dan.
9. Melaksanakan tugas teknis dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

UPTD Pelatihan Kesehatan diklasifikasikan UPTD Kelas A. Susunan Organisasi UPTD Pelatihan Kesehatan terdiri atas:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu;
4. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. kelompok jabatan fungsional.

c. UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

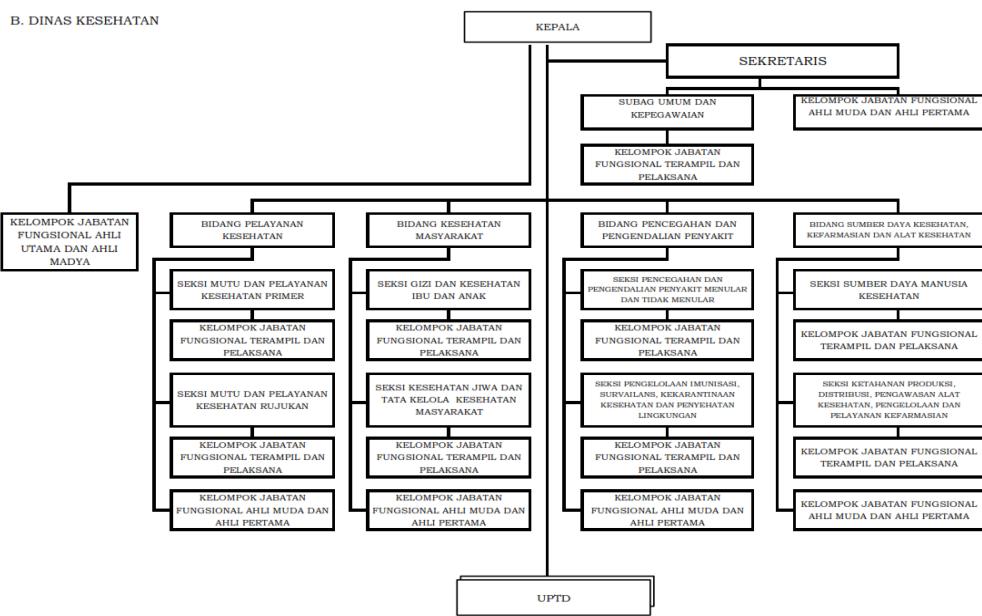
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dan kalibrasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi:

1. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPTD;
2. pelaksanaan rencana strategis dan di=okumen pelaksanaan anggaran UPTD;
3. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat;
4. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium kimia kesehatan dan lingkungan;
5. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan rujukan pemeriksaan laboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium kimia kesehatan dan lingkungan;
6. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan kalibrasi;
7. Pelaksanaan kegiatan operasional pengendalian mutu;
8. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pelaporan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UOTD; dan
9. pelaksanaan tugas teknis dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pengendalian Mutu; dan
5. kelompok jabatan fungsional

Gambar 1
SOTK Dinas Kesehatan Provinsi Banten



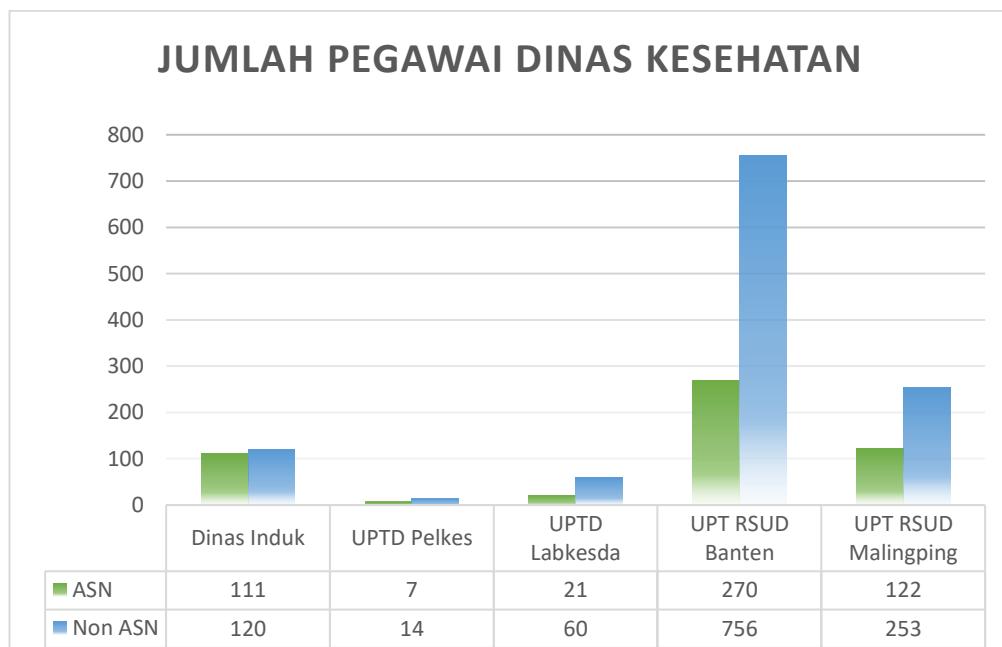
B. Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan

Pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten berstatus Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK), dan Non ASN. Jabatan yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Banten terdapat dua jenis Jabatan, yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari Jabatan Struktural Eselon II/a,

Esselon II/b, Eselon III/a, Eselon III/b, Eselon IV/a, serta Jabatan Fungsional Umum (Staf/Pelaksana). Sedangkan Jabatan Fungsional antara lain dokter, perawat, bidan, apoteker , dll.

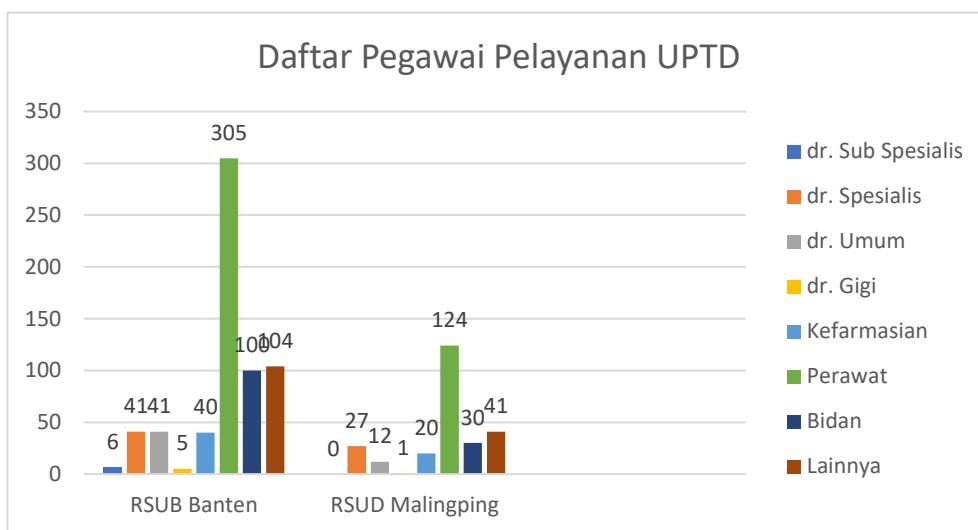
UPTD RSUD Labuan dan UPTD RSUD Cilograng sampai saat ini belum beroperasional karena masih terkendala perekrutan pegawai tenaga kesehatan, sehingga jumlah pegawai belum dapat dilakukan rekapitulasi. Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, UPTD Labkesda, UPTD Upelkes, UPTD RSUD Malingping dan UPTD RSUD Banten sampai dengan Tahun 2024 menurut status kepegawaian, Jabatan, Strata dan tingkat pendidikan formal sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Tahun 2024



Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian Tahun 2024

Gambar 3
Tenaga Kesehatan di UPTD RSUD Banten dan UPTD RSUD Malingping



Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawai Tahun 2024

1.5 Isu - Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Banten

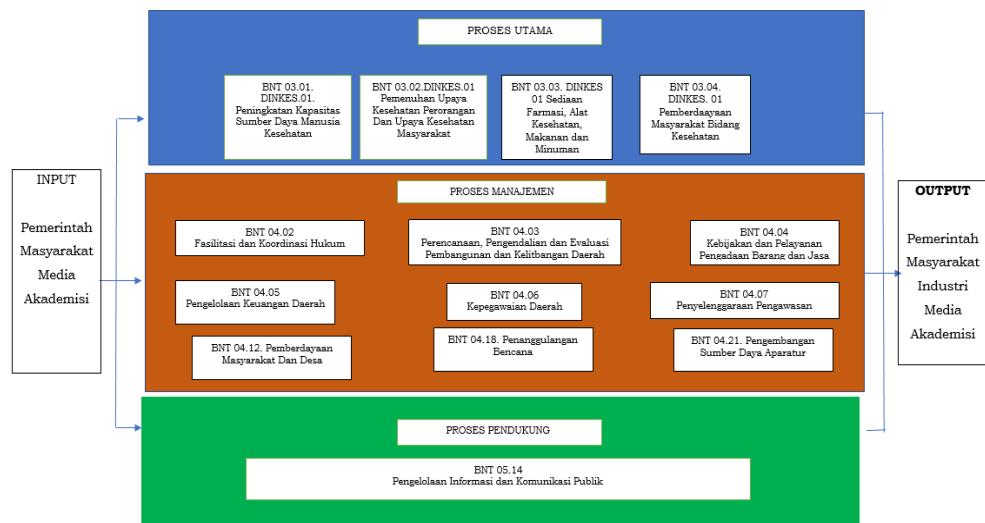
Belum beroperasionalnya RSUD Labuan dan RSUD Cilograng sampai dengan akhir tahun 2024 merupakan pekerjaan rumah Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan Kesehatan khususnya di wilayah Banten Selatan. Status Kesehatan Masyarakat masih rendah ditandai dengan masih tingginya jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi di Provinsi Banten, data yang diperoleh dari Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak menyebutkan bahwa jumlah kasus kematian ibu berjumlah 162 dengan jumlah kasus terbanyak berada di Kabupaten Tangerang sebanyak 34 kasus dan kasus kematian bayi berjumlah 1.024 dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Lebak sebanyak 278 kasus.

Angka kejadian kesakitan akibat infeksi penyakit menular langsung maupun melalui Binatang masih cukup tinggi, sementara

pada saat bersamaan kejadian degenerative (hipertensi, jantung, diabetes melitus, dll) mulai meningkat. Target Pemerintah Pusat untuk percepatan penurunan Stunting menjadi 14% pada tahun 2024 dan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penuruan Stunting menjadikan pemicu semangat bagi Pemerintah Provinsi Banten khususnya Dinas Kesehatan untuk bekerja lebih giat lagi baik dari sisi perencanaan sampai ke pelaksanaan program dan kegiatan yang terdampak langsung terhadap pencapaian percepatan penuruan stunting. Prevalensi Stunting Provins Banten tahun 2023 adalah sebesar 24%, meningkat jika dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 20%. Hal ini disebabkan belum optimalnya pemberdayaan Masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan status gizi Masyarakat masih rendah. Diharapkan dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia dapat secara signifikan menurunkan prevalensi stunting.

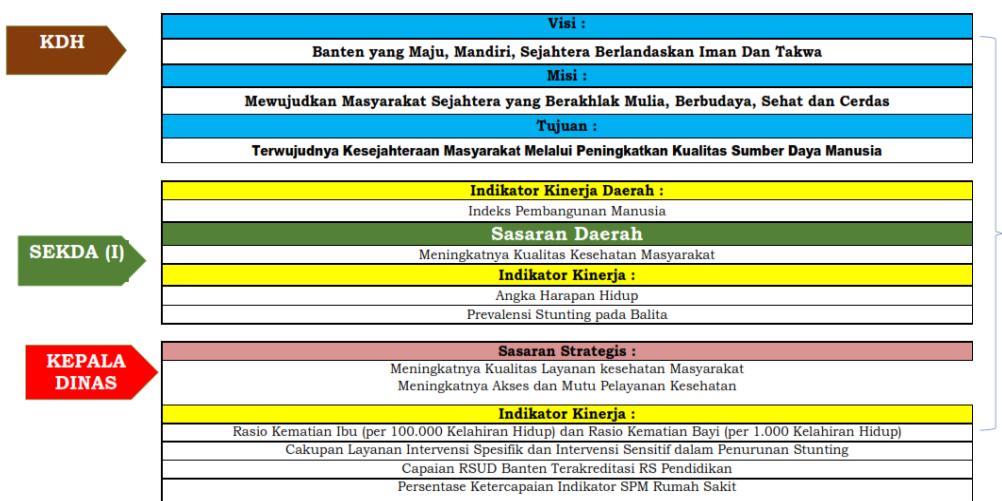
1.6 Proses Bisnis Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Proses Bisnis Dinas Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk tujuan tertentu. Proses bisnis ini meliputi beberapa aspek, seperti regulasi dan kebijakan Upaya Kesehatan Masyarakat, manajemen personalia, manajemen perencanaan dan keuangan, pengelolaan asset, pengelolaan kepegawaian, pengawasan dan pengelolaan kefarmasian, pengelolaan alat Kesehatan, pengelolaan fasilitas pelayanan Kesehatan, pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit, dan peningkatan kualitas Kesehatan Masyarakat.



Cascading atau pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawali struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja yang diinginkan.

Dalam menyusun pohon kinerja, yang diperlukan oleh instansi pemerintah adalah mengubah alur berfikir logis dari sebuah skema model logis, yang awalnya dimulai dari input dan berakhir mencapai outcome, menjadi dimulai dari outcome yang diinginkan dan berakhir pada input.



1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023

MATRIK RENCANA AKSI TINDAKLANJUT AKIP DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	DOKUMEN TINDAK LANJUT
LHE AKIP TAHUN 2023						
1	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bappeda Provinsi Banten terkait penyusunan cascading	<p>Telah dilakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Banten untuk penyusunan cascading Dinas Kesehatan Provinsi Banten</p> <p>Data Dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Evaluasi Proses Bisnis, tanggal 20 September 2024; 2. Dokumentasi membuat pohon kinerja yang bertempat di ruang rapat Bappeda pada tanggal 20 April 2024; 3. Pohon kinerja Dinkes 	1 Hari	20 September 2024	Telah ditindaklanjuti pada tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Evaluasi Peta Proses, tanggal 20 September 2024 2. Dokumentasi 3. Pohon Kinerja
2	Mempublikasikan seluruh dokumen SAKIP pada website esr.menpan.go.id dan di website Dinas Kesehatan Provinsi Banten	Telah dilakukan publikasi dokumen SAKIP pada website Dinas Kesehatan dan esr kemenpan	1 Hari	28 April 2024	Telah ditindaklanjuti pada tahun 2024	Screenshoot dokumen SAKIP yang di upload di esr Menpan RB dan Website Dinas Kesehatan Provinsi Banten (bukti publikasi)
3	Penyusunan dokumen Renja Perubahan perlu menguraikan permasalahan yang terjadi sampai dengan Triwulan II	Telah diuraikan dalam dokumen Renja Perubahan Dinas Kesehatan pada hal 10 – 32	1 Hari	8 November 2024	Telah ditindaklanjuti pada tahun 2024	DOkumen Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2024 pada Halaman 10-32

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	DOKUMEN TINDAK LANJUT
4	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi Banten tentang penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan pengukuran kinerja internal	Telah dilakukan koordinasi terkait pelaksanaan pengukuran kinerja melalui aplikasi SIMRAL	1 Hari	15 November 2024	Telah ditindaklanjuti pada tahun 2024	Surat Usulan terkait Penggunaan Aplikasi Pengukuran Kinerja dan EValuasi AKIP yang ditujukan kepada Kepala Provinsi Banten
5	Dalam penyusunan laporan evaluasi kinerja triwulan pada tahun berikutnya agar memberikan informasi faktor pendorong, faktor penghambat dan rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target di setiap Triwulan;	Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja (TW I) Tahun 2024 yang memberikan infiormasi foaktor pendorong, faktor penghambat dan rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target	1 Hari	8 November 2024	Telah ditindaklanjuti pada tahun 2024	1. Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan I Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2024 2. Screenshot pada SIMRAL yang menginformasikan faktor penghambat, faktor pendorong dan rekomendasi/tindaklanjut
6	Dalam laporan kinerja agar menyajikan: a. Perbandingan realisasi kinerja tahun berkenan dengan tahun-tahun sebelumnya; b. Menjelaskan tata cara perhitungan realisasi atas target kinerja dari indikator kinerja sasaran dan melampirkan sumber datanya	Dalam dokumen LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2023 telah memuat atau menyajikan perbandingan kinerja berkenaan dengan tahun sebelumnya termuat dalam Bab II halaman 58. Sedangkan unItuk tata cara perhitunagn realisasi dijelaskan pada halaman 52 sampai halaman 58.	1 Hari	22 April 2024	Telah ditindaklanjuti pada tahun 2024	Dokumen LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2023 halaman 52-58 dan 59-63

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	DOKUMEN TINDAK LANJUT
7	Menyusun laporan capaian kinerja pada setiap bidang atas hasil capaian kinerja program dan kegiatan setiap triwulan	Laporan capaian kinerja setiap bidang sudah disusun untuk setiap triwulannya pada aplikasi SAKIP	1 Hari	22 April 2024	Telah ditindaklanjuti pada tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Triwulan (I-IV) 2. Capaian Kinerja Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang SDK Kefarmasian, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit
8	Menyelesaikan tindak lanjut seluruh rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 berdasarkan LHE Nomor 700/0215-Inspektorat/2023 tanggal 27 Maret 2023	Telah menindaklanjuti seluruh Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 berdasarkan LHE Nomor 700/0215-Inspektorat/2023 tanggal 27 Maret 2023	1 Hari	19 April 2024	Telah ditindaklanjuti pada tahun 2024	Dokumen LKIP Hal 58-63 poin 2 membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 Pada tabel 3.2 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

1.8 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi, cascading dan proses bisnis dinas kesehatan

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan sasaran strategis organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan capaian analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Bab IV

Penutup

Lampiran

- Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
- Surat Pernyataan telah direview oleh Inspektorat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026

Dengan berakhirnya masa bhakti Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2017-2022 dan akan diselenggarakannya Pemilihan Umum serentak pada Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Banten berkewajiban menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah hasil Pemilukada serentak Tahun 2024. RPD merupakan penyelarasan target indikator makro dan penyelarasan program prioritas nasional untuk diakomodir dalam dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah. Setelah RPD Provinsi Banten ditetapkan, Dinas Kesehatan menetapkan Renstrsa Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026.

Pelaksanaan RPD tahun 2023-2026 merupakan tahapan kelima dari RPJPD Provinsi Banten yaitu Tahapan Modernisasi, atau tahap akhir dari RPJPD Provinsi Banten 2005-2025. Pada tahapan modernisasi ini prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten berfokus pada 1) Peningkatan Kesejahteraan Sosial, 2) Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia, 3) Pemantapan Daya Saing Perekonomian, 5) Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 6) Penyelenggaran Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih, dan 7) Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.

Visi yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten 2005 - 2025 yaitu **“Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan**

Taqwa”. Dalam rangka mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Banten menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

- 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas,**
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan,
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari,
- 4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan BERwibawa,**

Untuk mewujudkan kelima misi tersebut diperlukan keterlibatan semua pihak dengan leading sektor OPD Provinsi Banten sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan misi pertama yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbuyada, Sehat dan Cerdas”** dengan fungsi sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Kesehatan. Tujuan dari misi pertama tersebut **adalah Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**, sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dalam misi tersebut adalah **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Adapun faktor-faktor permasalahan pelayanan sektor kesehatan yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi RPJPD

diantaranya: (1). Masih Minimnya Pembangunan fasilitas Pelayanan Kesehatan; (2). Belum optimalnya Pengembangan Rumah Sakit Rujukan Regional; (3). Masih tingginya Angka Kematian Ibu; (4). Masih tingginya Angka Kematian Bayi; (5). Belum optimalnya Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; (6). Belum optimalnya kualitas dan sebaran SDM kesehatan dan Kefarmasian.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten secara umum adalah terselenggaranya pembangunan Kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat Kesehatan Masyarakat Banten yang setinggi-tingginya. Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten 2023-2026 yang secara langsung berkaitan dengan urusan Kesehatan, yaitu:

1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat.

Tujuan dan sasaran RPD tersebut didukung oleh tujuan Renstra Dinas Kesehatan yaitu Terwujudnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan Guna Meningkatkan Kulaitas dan Daya Saing SMD, dengan sasaran yaitu: 1) Peningkatan Kulaitas Layanan Kesehatan, dan 2) Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, bersih dan berwibawa, dengan sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokasi

Tujuan RPD tersebut didukung oleh tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan yaitumeningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Pemerintah Dina Kesehatan. Adapun Sasarannya

yaitu meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan Dinas Kesehatan

Dalam upaya mencapai target Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Banten 2023-2026, Dinas Kesehatan merumuskan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan beserta Indikator Kinerja yang tertuang dalam dokumern Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja			
				2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Dinas Kesehatan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perintah) Perangkat Daerah	70-80	70-80	70-80	70-80
2	Terwujudnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan Guna Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting	40	50	60	70
			Rasio Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	81	80	79	78
			Rasio Kematian Bayi (per 1.000) kelahiran hidup	4,7	4,6	4,5	4,4
		Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Percentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	76,92	92,31	100	100
			Percentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	100	100	100	100

Sumber: Renstra 2023 - 2026

Arah Kebijakan merupakan rumusan yang merasionalkan pilihan strategi agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran dalam waktu 4 (empat) Tahun, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD Provinsi Banten 2023-2026.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Banten yang maju, mandiri, Sejahtera, berlandaskan iman dan taqwa			
Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlik Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Pemerintahan Dinas Kesehatan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Dinas Kesehatan	Meingkatkan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Dinas Kesehatan	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
Misi 4: Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan Guna Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Menigkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan SPM Kesehatan, Pengendalian terhadap Penyakit Menular, Tidak Menular serta Peningkatan Kesehatan Jiwa
		Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing melalui Pembangunan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan Obat Publik, Perbekalan Kesehatan dan Pembinaan Sarana dan Alat Kesehatan
			Pemenuhan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin
			Peningkatan Kompetensi, Distribusi dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
			Peningkatan Upaya Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
		Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Akses dan Mutu Menuju RS Pendidikan
			Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan melalui Pemenuhan indikator SPM Rumah Skit

Sumber: Perubahan Renstra 2023 - 2026

2.2 Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Rencana Kerja Dinas (Renja) Kesehatan merupakan usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Renja disusun untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan, secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	
			Kinerja	Keuangan
1	2	3	4	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	313.448.560,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	8.169.200,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	6.158.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	10.977.200,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	10.977.200,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	5.440.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	228.772.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	18.374.240,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	8.476.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	8.476.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	8.052.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	8.052.000,00

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	
			Kinerja	Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	91.649.600,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	14.424.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216	40.342.865.835,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	977.940.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	13.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	49.219.200,00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	24.910.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (UPT RSUD Banten)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (satuan: orang)	219	65.354.440.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99	29.370.834.000,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	310.680.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	9.398.400,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	142.620.000,00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	3.150.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	26.400.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	214.535.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	125.897.500,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	1.397.071.700,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	1.011.531.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	903.989.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	889.042.000,00

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	
			Kinerja	Keuangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	1.913.162.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	34.515.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD LABKESDA)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	1	15.511.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPTD LABKESDA)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	1	170.816.200,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD LABKESDA)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	1	98.640.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD LABKESDA)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	3	37.175.100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PELKES)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	1	9.655.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PELKES)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	1	118.190.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPTD PELKES)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	1	27.488.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PELKES)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	1	30.300.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD PELKES)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	1	18.932.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PELKES)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	1	147.780.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT RSUD Banten)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (satuan: paket)	1	150.000.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	273.238.225,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	755.767.500,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	48.592.400,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	876.382.300,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	272.760.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	24.491.600.920,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (satuan: unit)	7	6.874.460.420,00
	Pengadaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11	1.218.320.000,00

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	
			Kinerja	Keuangan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8	5.402.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD LABKESDA)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	18	127.520.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PELKES)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	12	1.031.910.684,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	25.500.000,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	1.800.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17	614.716.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (satuan: laporan)	12	2.167.941.005,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (satuan: laporan)	12	14.305.638.524,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD LABKESDA)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Bulan)	12	549.202.894,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD LABKESDA)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Bulan)	12	3.592.727.120,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PELKES)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Bulan)	12	112.149.500,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD PELKES)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Bulan)	12	438.674.400,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT RSUD Banten)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (satuan: laporan)	3	900.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT RSUD Banten)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (satuan: laporan)	1	35.219.361.629,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1.952.428.200,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	24.010.205.588,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (satuan: unit)	2	76.820.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (satuan: unit)	50	1.564.637.200,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	1.031.456.400,00

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	
			Kinerja	Keuangan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (satuan: unit)	4	1.288.448.774,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	595.675.182,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1.181.573.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD LABKESDA)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Bulan)	14	308.848.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD LABKESDA)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	127	100.595.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD LABKESDA)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	1	136.983.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD LABKESDA)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	1	72.212.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PELKES)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Bulan)	9	177.790.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PELKES)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	3	40.906.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD PELKES)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	1	70.700.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD RSUD Banten)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	1	100.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT RSUD Banten)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	976.885.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26	670.820.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125	335.662.800,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	199.200.000,00
	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49	375.518.000,00
Peningkatan Pelayanan BLUD				

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	
			Kinerja	Keuangan
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT RSUD Banten)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (satuan: unit kerja)	1	186.946.724.272,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	59.487.028.205,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
		Cakupan Kualitas Keluarga Sehat (%)	57	
		Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban) (%)	86	
		Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu (unit)	239	
		Persentase Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin (%)	100	
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana (%)	100	
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Beresiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (%)	100	
		Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (%)	100	
		Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (%)	100	
		Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi (%)	79,37	
		Rasio Daya Tampung RS Rujukan (Rasio)	0,14	
		Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi (parameter)	123	
		Persentase Standar Bagian Pelayanan sebagai RS Pendidikan	100	
		Persentase Standar Bagian Penunjang sebagai RS Pendidikan	100	
		Persentase Standar Bagian Penunjang Logistik sebagai RS Pendidikan	100	
		Persentase Standar Bagian Pelayanan Medis sebagai RS Pendidikan	100	
		Persentase Standar Bagian Pelayanan Keperawatan sebagai RS Pendidikan	100	
		Persentase Standar Bagian Penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS Pendidikan	100	
		Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	
		Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	
			Kinerja	Keuangan
		Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan alat kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (unit)	1	13.148.262.000,00
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	2	3.652.997.617,00
	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan (paket)	4	68.707.950.220,00
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksi, Makanan dan Minuman Ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1	79.200.000,00
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD LABKESDA)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2	836.293.241,00
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi (UPTD LABKESDA)	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	11	977.467.278,00
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan (UPTD LABKESDA)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	11	5.115.800.220,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (UPTD LABKESDA)	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	29	1.280.213.086,00
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT RSUD Banten)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (satuan: unit)	2	5.225.000.000,00
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (UPT RSUD Banten)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	935	500.000.000,00
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (UPT RSUD Banten)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	5	4.356.986.000,00
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit (UPT RSUD Banten)	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (satuan: unit)	2.235	1.900.000.000,00
	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas Kesehatan (UPT RSUD Banten)	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan (satuan: paket)	4	35.206.059.493,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	3	441.120.210,00

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	
			Kinerja	Keuangan
	Pengembangan Rumah Sakit (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (unit)	1	1.800.000,00
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	6	11.896.940.395,00
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	62	2.508.974.320,00
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	6	438.402.752,00
	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas Kesehatan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	6	20.973.829.365,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	500	78.852.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	300	246.058.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	3	1.273.345.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (dokumen)	1	38.913.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	2	18.330.345.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (dokumen)	8	403.838.800,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	8	1.581.039.200,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (dokumen)	2	800.947.440,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	11	3.345.718.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (dokumen)	8	94.701.600

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	
			Kinerja	Keuangan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (dokumen)	7	1.445.548.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis (orang)	189	437.100.000,00
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (dokumen)	3	365.156.666.600,00
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (dokumen)	2	472.379.600,00
	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (dokumen)	3	160.976.800,00
	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota (dokumen)	8	405.780.000,00
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (unit)	7	26.580.000,00
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8	361.952.000,00
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	25	376.612.000,00
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7	260.696.640,00
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	87.664.000,00
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (unit)	106	500.164.000,00
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (unit)	40	5.487.966.000,00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (UPT RSUD Banten)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	1.702.000.000,00
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	5.376.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
		Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan (orang)	470	

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	
			Kinerja	Keuangan
		Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat pada UPT Pelatihan Kesehatan (orang)	420	
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (orang)	287	22.277.431.016,00
	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi (orang)	287	453.383.000,00
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (orang)	420	810.631.600,00
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (dokumen)	8	301.527.000,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan (persen)	100	
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT	100	
	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)			
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan (sarana)	50	1.001.521.000,00
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)				
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (sarana)	50	92.508.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (kelompok masyarakat)	14	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (dokumen)	2	869.386.000,00
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provins			

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	
			Kinerja	Keuangan
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (dokumen)	2	1.377.655.000,00

2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Dinas Kesehatan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	70-80	Nilai	1.1233.195.072.570
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting	50	Per센	
		Rasio Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	80	Rasio	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp.)
4	Meingkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Rasio Keatian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	4,6	Rasio	
		Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	92,31	Persen	
		Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	100	Persen	

Sum b e r : D a t a a d i o l a h

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan kinerja tahun pertama dari RPD Provinsi Banten 2023 – 2026 serta Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2023 – 2026, yang didukung dengan anggaran Pembangunan Kesehatan pada APBD sebesar Rp.1.243.754.722.970,00 yang terbagi dalam 13 Program, 43 kegiatan, 148 Sub Kegiatan serta 2 kegiatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) pada RSUD Malingping dan RSUD Banten. Pada Urusan Wajib Kesehatan didukung oleh 5 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran	IKU	Program / Indikator Program	Target	Satuan
2	3	4	6	7
Mennigkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Dinas Kesehatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
		1 Presentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen
		2 Presentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	100	Persen

Tujuan/ Sasaran	IKU	Program / Indikator Program		Target	Satuan
		2	3	4	6
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting	3	Presentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100	Persen
			Presentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD RSUD Banten	100	Persen
			Presentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD RSUD Malingping	100	Persen
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
		1	Cakupan Keluarga Sehat	57	Persen
		2	Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban)	86	Persen
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
		1	Presentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	100	Persen
		2	Presentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	100	Persen
			Presentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	Persen
Rasio Kematian Ibu	Rasio Kematian Bayi		Presentase Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin	100	Persen
			Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	239	Sarana
			Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,14	Rasio
			Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	79,37	Persen

Tujuan/ Sasaran	IKU	Program / Indikator Program		Target	Satuan	
		2	3	4	6	7
				Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100	Persen
				Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi	123	Parameter
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
		1	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan	470	Orang	
		2	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat	420	Orang	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman				
		1	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan	100	Persen	
		2	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga dan PKRT	100	Persen	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
		1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Tingkat Daerah Provinsi	14	Kelompok Masyarakat	
Menigkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Percentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
		1	Percentase Standar Bagian Penunjang Sebagai RS pendidikan	100	Persen	
		2	Percentase Standar Bagian Penunjang Logistik sebagai RS Pendidikan	100	Persen	
		3	Percentase Standar Bagian Penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS Pendidikan	100	Persen	
		4	Percentase Standar Bagian Pelayanan sebagai RS Pendidikan	100	Persen	
		5	Percentase Standar Bagian Pelayanan Medis sebagai RS Pendidikan	100	Persen	
		6	Percentase Standar Bagian Keperawatan sebagai RS Pendidikan	100	Persen	
	Percentase Ketercapaiaan Indikator SPM Rumah Sakit		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
		1	Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	Persen	
		2	Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	Persen	

Tujuan/ Sasaran	IKU	Program / Indikator Program		Target	Satuan
2	3	4		6	7
		3	Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	Persen

S u m b e r : D a t a a d i o l a h

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

Penyelenggaraan Pemerintahan menuju *Good Governance* dalam rangka reformasi birokrasi yang berbasis kinerja menuntut pelaksanaan program/kegiatan yang berorientasi pada hasil atau keluaran yang memberikan dampak perbaikan atau perubahan di Masyarakat. Laporan akuntabilitas kinerja menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan oleh Masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam pelaksanaan program/kegiatan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik yang professional, akuntabel dan transparan.

Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Laporan hasil PKO menjadi satu kesatuan dengan laporan hasil evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja instant pemerintah entitas akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan capaian perjanjian kinerja dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Unit Organisasi setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja;

2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada entitas akuntabilitasi kinerja dalam Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diterbitkan oleh Inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal instansi Pemerintah. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berupa nilai dan kategori/predikat sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Nilai dan Kategori Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah**

Nilai	Kategori/Predikat
>90 – 100	AA / Sangat Memuaskan
>80 – 90	A / Memuaskan
>70 – 80	BB / Sangat Baik
>60 – 70	B / Baik
>50 – 60	CC / Cukup (Memadai)
>30 – 50	C / Kurang
>0 – 30	D / Sangat Kurang

Cara perhitungan PKO sesuai dengan lampiran Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi

tertuang dalam matriks sebagai berikut:

Tabel 3.2 Makriks PKO

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan memperhatikan prinsip PKO sebagaimana disebut di atas yaitu terkait dengan prinsip berorientasi hasil serta mempertimbangkan koreksi terhadap anomaly capaian kinerja instansi dan unit/satuan kerja, maka dipandang perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- (i) Jika capaian kinerja setiap indkator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi **110%**, dan
- (ii) Jika capaian kinerja setiap indkator $\leq110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

2. Koreksi normalisasi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Setelah normalisasi capaian perjanjian kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator maka hasil normalisasi tersebut dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang bersumber dari

hasil evaluasi sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3.1

Sumber Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Sumber: Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagai mana yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PREDIKAT AKIP	KOREKSI CAPAIAN PK SETELAH NORMALISASI
AA	0%
A	10%
BB	15%
B	

CC	20%
C	30%
D	

3. Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja

Selanjutnya akan diperoleh nilai akhir capaian perjanjian kinerja yang merupakan hasil perkalian normalisasi capaian perjanjian kinerja (Langkah 1) dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Langkah 2)

4. Total Capaian Perjanjian Kinerja

Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian PK (langkah 3) pada setiap indikator kinerja

5. Nilai Kinerja Organisasi

Nilai kinerja organisasi merupakan hasil perhitungan dari total capaian perjanjian kinerja (Langkah 4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja

6. Predikat PKO

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)

NILAI KINERJA ORGANISASI	PREDIKAT PKO
$X > 100\%$	ISTIMEWA
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN
$20\% < X \leq 60\%$	KURANG
$0\% < X \leq 10\%$	SANGAT KURANG

Penentuan predikat PKO entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi juga dapat mempertimbangkan ekspektasi pimpinan 1 (satu) level di atas Entitas Akuntabilitas Kinerja yang dinilai.

Selanjutnya, setiap predikat PKO memiliki makna yang menggambarkan tingkatan kualitas capaian kinerja organisasi. Terjemahan pada setiap predikat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Interpretasi Predikat PKO

Predikat Kinerja Organisasi	Interpretasi
ISTIMEWA	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit organisasi
BAIK	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi
BUTUH PERBAIKAN	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik manun masih di bawah ekspektasi/target
KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target
SANGAT KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan di bawah ekspektasi/target

Dalam mengukur capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2024, berikut disampaikan target kinerja tahun 2024 beserta realisasi kinerjanya dan perbandingan-perbandingan terhadap target dan realisasi kinerja yang dijelaskan dalam poin-poin berikut ini:

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan, berikut ditampilkan capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024:

Tabel 3.6
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian	Kor eksi	Nilai Akhir	
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Dinas Kesehatan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi) Perangkat Daerah	70-80	78,50	112,14	110	15	99,00	
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting	50	75	150	110	15	99,00	
		Rasio Kematian Ibu	80	71,7	110,34	110	15	99,00	
		Rasio Kematian Bayi	4,6	4,5	102,17	102,17	15	91,96	
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	92,31	92,31	100	100	15	90,00	
		Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	100	100	100	100	15	90,00	
Total Capaian PK								537,37	
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK								89,56	
Predikat PKO								BAIK	

Sumber: data diolah

Pada tabel 3.6 dapat dijelaskan bahwa Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Dinas Kesehatan Provinsi Banten mendapatkan nilai 94,83 dan masuk dalam kategori BAIK. Artinya Tingkat implementasi kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.

Seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada Tahun 2024 tercapai sesuai dengan target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Berikut adalah Langkah-langkah perhitungan capaian IKU:

1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah

Nilai capaian SAKIP Perangkat Daerah diperoleh atas hasil penilaian SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Banten, untuk penilaian SAKIP Tahun 2024 sedang berproses, maka digunakan nilai SAKIP pada Tahun 2023 nilai SAKIP Dinas Kesehatan adalah sebesar 78,5

2. Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penuruan Stunting

Capaian indikator Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penuruan Stunting diperoleh dari capaian atas indikator intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang merupakan kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 21 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Indikator yang menjadi kewenangan dari Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mendapatkan tambahan asupan gizi	90%	67,27%	74,74
2	Ibu hamil mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan	80%	95,33%	119,16
3	Remaja putri mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	58%	91,91%	158,46
4	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	80%	83,8%	104,75
5	Anak usia 6-23 bulan mendapat MP-ASI	80%	90%	112,5
6	Balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	90%	98,9%	106,88
7	Balita dipantau pertumbuhan dan	90%	102,04%	113,37

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	perkembangannya			
8	Balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	90%	76,85%	85,38
9	Balita memperoleh imunisasi dasar lengkap	90%	100,89%	112,1
10	Penduduk menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	100%	100%	100
11	Desa/Kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	90%	52,71%	58,56
12	Target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas	70%	87,5%	125

Dari dua belas (12) indikator intervensi spesifik dan intervensi sensitive yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan, terdapat sembilan (9) indikator yang mencapai target pada tahun 2024. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Indikator Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang mencapai Target}}{\text{Jumlah Total Indikator Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sesuai Perpres 72}} \times 100\%$$

Dari 12 indikator total indikator yang tercapai adalah 9 indikator sehingga $\frac{9}{12} \times 100 = 75\%$. Target kinerja Sasaran Cakaupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting Tahun 2024 adalah sebesar 50%, dengan realisasi kinerja sebesar 75% maka capaian kinerja sasarnya adalah 150% dan dari 12 indikator juga 3 indikator yang masih belum tercapai yaitu pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, desa dan kelurahan stop BABS (buang air besar sembarangan) adanya dana BOK puskesmas untuk pemberian makanan tambahan sebagian besar salur pada semester 2 tahun 2024, kebiasaan perilaku

masyarakat BABS, dukungan lintas sektor dalam penyediaan sarana dan pelaporan pada system.

Solusi dari masalah tersebut akan melakukan penyaluran dana BOK puskesmas untuk PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dari awal tahun 2025 sehingga pelaksanaan bisa dimulai sejak awal, update DO indikator kepada petugas puskesmas, pelaksanaan STBM stunting oleh petugas kesling, pelibatan OPD dan CSR terkait dalam penyediaan sanitasi dan sosialisasi STBM stunting.

3. Rasio Kematian Ibu dan Rasio Kematian Bayi

Perhitungan Rasio Kematian Ibu dan Rasio Kematian menggunakan jumlah kelahiran hidup bayi, Jumlah Kematian Ibu pada saat hamil, bersalin dan nifas serta jumlah kematian bayi, dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Kematian Ibu

$$= \frac{\text{Jumlah Kematian Ibu pada Saat Hamil, Melahirkan dan Nifas}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup dalam 1 Tahun}} \times 100.000 \text{ Kelahiran hidup}$$

Rasio Kematian Bayi

$$= \frac{\text{Jumlah Kematian Bayi}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup dalam 1 Tahun}} \times 1.000 \text{ Kelahiran hidup}$$

Data kelahiran hidup, kematian ibu dan kematian bayi diperoleh dari laporan Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kematian Bayi	Rasio Kematian Ibu	Rasio Kematian Bayi
1	Kab. Pandeglang	24.342	28	129	115,03	5,3
2	Kab. Lebak	23.685	30	276	126,66	11,65
3	Kab Tangerang	58.233	34	214	58,39	3,67
4	Kab. Serang	35.140	33	204	93,91	5,81
5	Kota Tangerang	38.745	7	37	18,07	0,95

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kematian Bayi	Rasio Kematian Ibu	Rasio Kematian Bayi
6	Kotas Cilegon	8.228	6	76	72,92	9,24
7	Kota Serang	11.672	20	75	171,35	6,43
8	Kota Tangsel	27.851	5	15	17,95	0,54
	Prov Banten	227.986	163	1.026	71,52	4,5

Sumber data: Laporan KIA Kab/Kota (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan pada Tahun 2024 untuk Rasio Kematian Bayi dan Rasio Kematian Ibu tercapai dari target yang telah ditetapkan yaitu 4,6 dengan capaian kinerja 102,17% dari target 4,5 untuk Rasio Kematian Bayi, sedangkan Capaian Rasio Kematian Ibu adalah 71,52 dengan target 80 atau capaian kinerjanya sebesar 110%. Namun jika dilihat dari jumlah kasus kematian baik kematian bayi maupun kematian ibu masih sangatlah besar di wilayah Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang, hal ini disebabkan status Kesehatan Masyarakat masih rendah, dan adanya disparitas kondisi status kesehatan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang masih lebar antar Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi Banten.

4. Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan

Capaian Rumah Sakit Pendidikan merupakan indikator persyaratan yang harus dipenuhi oleh UPTD RSUD Banten menuju Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan, yaitu:

1. Telah menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dan mampu menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan Pendidikan;
2. Memiliki izin operasional yang masih berlaku;
3. Terakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

4. Memiliki dokumen perjanjian kerja sama dengan Institusi Pendidikan;
5. Memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sebagai dosen kedokteran, kedokteran gigi, dan Kesehatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Memiliki teknologi kedokteran dan/atau Kesehatan yang sesuai dengan standar nasional Pendidikan tenaga Kesehatan;
7. Memiliki program penelitian secara rutin;
8. Membuat pernyataan kesediaan menjadi Rumah Sakit Pendidikan dari pemilik rumah sakit, dan
9. Memenuhi standar Rumah Sakit Pendidikan, Adapun penjelasan dari Standar adalah sebagai berikut:
 - a. Standar visi, misi dan komitmen rumah sakit di bidang Pendidikan;
 - b. Standar menajemen dan administrasi Pendidikan;
 - c. Standar sumber daya manusia;
 - d. Standar sarana penunjang Pendidikan, dan standar perencanaan dan pelaksanaan program Pendidikan klinik yang berkualitas.

Rumus perhitungan indikator Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah persyaratan RS pendidikan yang telah terpenuhi}}{\text{Jumlah keseluruhan persyaratan RS Pendidikan}} \times 100\%$$

Kinerja tahun 2024 indikator Capaian Rumah Sakit Pendidikan dari 13 persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadikan RSUD Banten sebagai RS Pendidikan baru 12 indikator persyarikatan yang sudah dipenuhi, dengan capaian $12/13=92,31\%$. Adapun indikator persyaratan RS Pendidikan yang sudah terpenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan mampu

menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah sesuai dengan kebutuhan Pendidikan;

- b. Memiliki izin operasional yang masih berlaku;
- c. Terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan Institusi Pendidikan;
- e. Terdapat pernyataan kesediaan menjadi Rumah Sakit Pendidikan dari Pemilik RS;
- f. Memiliki program penelitian secara rutin;
- g. Memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sebagai dosen kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- h. Standar sumber daya manusia;
- i. Standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas;
- j. Standar sarana penunjang Pendidikan;
- k. Memiliki Visi, Misi komitmen RS di bidang Pendidikan, dan
- l. Standar manajemen dan administrasi Pendidikan.

5. Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit

Standar Pelayanan Minimal SPM) merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh Rumah Sakit sebagai pedoman dalam menjamin pelayanan Kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/11/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 129/PMK.05/202 tentang Pedoman Pengelolaan BLU.

SPM Rumah Sakit Malingping terdiri atas SPM Pelayanan Medis, SPM Keperawatan dan SPM Penunjang, dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah indikator SPM RS yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh variabel indikator SPM RS}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan SPM Rumah Sakit ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator	Perhitungan	Tar ge t	Realisasi
	Percentase ketercapaian indikator SPM Rumah Sakit	$= \frac{\text{Jumlah indikator SPM RS yang tercapai}}{\text{Jumlah keseluruhan indikator SPM RS}} \times 100\%$	100%	100%
1	Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	$= \frac{\text{Jumlah indikator SPM Pelayanan Medis}}{\text{Jumlah total indikator SPM Pelayanan Medis}} \times 100\%$	100%	100%
2	Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	$= \frac{\text{Jumlah indikator SPM keperawatan}}{\text{Jumlah total indikator SPM Keperawatan}} \times 100\%$	100%	100%
3	Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	$= \frac{\text{Jumlah indikator SPM Pelayanan Penunjang}}{\text{Jumlah total indikator SPM Pelayanan Penunjang}} \times 100\%$	100%	100%

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Program Dinas Kesehatan
Tahun 2024

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	KRITERIA
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Labkesda	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kualitas Keluarga Sehat	57 %	87%	152,63%	Sangat Tinggi
		Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi Sehat (Jamban)	86%	94%	109,40%	Sangat Tinggi
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	239	261	109,21%	Sangat Tinggi
		Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,14	0,14	100%	Sangat Tinggi
		Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	79,37%	94,78%	119,42%	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100 %	100%	100%	Sangat Tinggi
		Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi (Labkesda Provinsi Banten)	123 parameter	126 parameter	102,44%	Sangat Tinggi
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang	470 Orang	470 Orang	100%	Sangat Tinggi

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	KRITERIA
	Manusia Kesehatan	Direkrut dan Didistribusikan				
		Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat Pada UPTD Pelatihan Kesehatan	420 Orang	449 Orang	106,9%	Sangat Tinggi
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Percentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasi dan Pengawasan Alat Kesehatan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Percentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	14 Kelompok Masyarakat	14 Kelompok Masyarakat	100%	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat Capaian Indikator Kinerja Program pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024 sebanyak 19 indikator tercapai dengan sangat baik.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Program UPT RSUD Banten
Tahun 2024

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Banten	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Percentase Standar Bagian Penunjang sebagai RS Pendidikan (RSUD Banten)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Percentase Standar Bagian Penunjang	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	KRITERIA
	Kesehatan Masyarakat	Logistik sebagai RS Pendidikan (RSUD Banten)				
		Persentase Standar Bagian Penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS Pendidikan (RSUD Banten)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Standar Bagian Pelayanan sebagai RS Pendidikan (RSUD Banten)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Standar Bagian Pelayanan Medis sebagai RS Pendidikan (RSUD Banten)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Standar Bagian Keperawatan sebagai RS Pendidikan (RSUD Banten)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Program UPT RSUD Malingping
Tahun 2024

NO	URAIAN PROG	INDIKATOR PROG	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Malingping	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa seluruh capaian target kinerja Standar Pelayanan Mutu (SPM) pada UPT RSUD Banten dan RSUD Malingping tercapai.

2. Membandingkan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Table 3.10
Pengukuran Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	IKU	Indikator Kinerja Program	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Mennigkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntable, Efektif dan Efesien		Capaian SAKIP	75	80	85	-	-	78	81,5	85	-	-	104	95,88	100	-	-
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi															
	1	Presentase Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100	100	100	-		100	100	100	-	-	100	100	100	-	-

Sasaran	IKU	Indikator Kinerja Program	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
		3 Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
		4 Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-

Sasaran	IKU	Indikator Kinerja Program	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		perangkat daerah															
Meningkatnya Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	Presentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan		100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat																
	1	Percentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium)	86	90	99	-	-	90	100	94,24	-	-	111,11	123,46	100,26	-	-
	2	Percentase Pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitas Ketergantungan Obat	50	75	90	-		50	50	50	-		100	100	66,67	-	-
	3	Percentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan	40	50	50	-	-	40	60	98,5	-	-	100	120	197	-	-
	4	Percentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan	100	100	100	-	-	94,23	83,78	100	-	-	94,23	83,78	100	-	-
	5	Presentase Pemenuhan Obat Publik	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-

Sasaran	IKU	Indikator Kinerja Program	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dan Perbekalan Kesehatan															
	6	Percentase Pembinaan Sarana Kefarmasian	70	80	95	-	-	70	90,11	100	-	-	100	112,64	105,26	-	-
	7	Percentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani	45	53	61	-	-	47,34	72,87	72,87	-	-	105,20	121,43	119,46	-	-
	8	keberhasilan Pengobatan TB (success rate) di Kab/Kota	90	90	90	-	-	92	91,76	90,05	-	-	102,22	101,90	100,06	-	-
	9	Prevalensi HIV	<0,5	<0,5	<0,5	-	-	0,33	0,1	013	-		166,67	500	384,6	-	-
	10	Inciden Rate DBD (Per 100.000 Penduduk)	<49	<49	<49	-	-	23,67	16,09	43,4	-	-	207,01	204,54	112,9	-	-
	11	Prevalensi Hipertensi	24	19	14	-	-	30	111	14	-	-	125	587,7	100	-	-
	12	Terlaksananya gerakan bebas pasung di kab/kota	8	8	8	-	-	8	8	8	-	-	100	100	100	-	-
	13	Percentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-

Sasaran	IKU	Indikator Kinerja Program	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1 4	Percentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
		Percentase Kab/Kota yang Mencapai Imunisasi Dasar Lengkap (IDL 95%)	75	87,5	100	-	-	50	94,8	100	-	-	66,67	108,34	100	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan																
	1	Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya	470	470	470	-	-	441	470	470	-	-	93,83	100	100	-	-
	2	Cakupan Terlatihnya SDM Kesehatan dan Masyarakat	150	150	140	-	-	150	150	300	-	-	100	100	214,3	-	-
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Berkualitas dan Mudah Dikses	Jumlah Kematian Ibu		237	232	227	-	-	237	232	198	-	-	100	100	116,8	-	-
	Jumlah Kematian Anak		1239	1134	1129	-	-	1068	1107	1107	-	-	113,8	98,01	101,9	-	-
	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat																
	1	Percentase Persalinan di	86	90	94	-	-	95,89	93,24	95,7	-	-	111,50	116,28	101,8	-	-

Sasaran	IKU	Indikator Kinerja Program	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		fasilitas pelayanan Kesehatan															
	2	Prevalensi Stunting	24,6	23,6	23,6	-	-	23,4	24,5	20	-	-	105,13	96,33	118	-	-
	3	Cakupan Kabupaten/Kota Sehat	7	8	8	-	-	7	8	8	-	-	100	100	100	-	-
		Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan															
	1	Cakupan Kabupaten/Kota Sehat	7	8	8	-	-	7	8	8	-	-	100	100	100	-	-
Tercapainya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dengan SPM	BOR RSUD Banten		70	75	80	-	-	67,06	75	80,8	-	-	95,8	100	101	-	-
	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat RSUD Banten																
	1	Capaian SPM Pelayanan Medis dan SPM Pelayanan Keperawatan	90	93	93	-	-	90	93	100	-	-	100	100	107,53	-	-
	2	Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten	90	93	93	-	-	90	93	100	-	-	1000	100	107,53	-	-
	3	Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten	90	93	93	-	-	90	93	97	-	-	100	100	104,3	-	-
	4	Capaian pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Banten dan kelengkapan	85	90	90	-	-	85	90	91,7	-	-	100	100	101,9	-	-

Sasaran	IKU	Indikator Kinerja Program	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan															
		5 Capaian pementahan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	85	90	90	-	-	85	90	91,3	-	-	100	100	101,4	-	-
		6 Presentase kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	85	90	90	-	-	85	90	92,3	-	-	100	100	102,6	-	-
	BOR RSUD Malingping		65	70	75	-	-	50,28	70	75,08	-	-	83,8	100	100	-	-
		Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat RSUD Malingping															
		1 Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Malingping	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
		2 Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Malingping	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
		3 Capaian SPM Penunjang RSUD Malingping	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah		-	-	-	70-80	70-80	-	-	-	78,5	78,5	-	-	-	112,1	112,1
																4	4

Sasaran	IKU	Indikator Kinerja Program	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dinas Kesehatan																	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi															
	1	Presentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
	2	Presentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Labkesda	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
	3	Presentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Pelatihan Kesehatan	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
	4	Presentase Ketercapaian dari Seluruh	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100

Sasaran	IKU	Indikator Kinerja Program	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT RSUD Banten															
	5	Presentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT RSUD Malingping	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting		-	-	-	40	50	-	-	-	60,6	75	-	-	-	166,5	150
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat															
	1	Cakupan Kualitas Keluarga Sehat	-	-	-	57	57	-	-	-	78,5	87	-	-	-	137,7	152,63
	2	Percentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban)	-	-	-	86	86	-	-	-	89,4	94	-	-	-	103,9	109,40

Sasaran	IKU	Indikator Kinerja Program	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan															
	1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (Kelompok Masyarakat)	-	-	-	13	14	-	-	-	13	14	-	-	-	100	100
		Rasio Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	-	-	-	81	80	-	-	-	69,1	71,7	-	-	-	100	111,5
		Rasio Kematian Bayi (per 10.000 kelahiran hidup)	-	-	-	47	46	-	-	-	4,7	4,5	-	-	-	98	102,2
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat															
	1	Presentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
	2	Presentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100

Sasaran	IKU	Indikator Kinerja Program	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kondisi Kejadian Luar Biasa															
	3	Presentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
	4	Percentase Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
	5	Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	-	-	-	239	239	-	-	-	252	261	-	-	-	105,4	109,21
	6	Rasio Daya Tampung RS Rujukan	-	-	-	0,13	0,14	-	-	-	0,13	0,14	-	-	-	100	100
	7	Percentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	-	-	-	79,20	79,37	-	-	-	91	94,78	-	-	-	114,9	119,42
	8	Percentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
	9	Peningkatan jumlah parameter	-	-	-	118	123	-	-	-	118	126	-	-	-	100	102,44

Sasaran	IKU	Indikator Kinerja Program	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi															
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan															
		1 Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan	-	-	-	470	470	-	-	-	470	470	-	-	-	100	100
		2 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat pada UPTD Pelatihan Kesehatan	-	-	-	360	420	-	-	-	360	449	-	-	-	100	106,9
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman															
		1 Presentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100

Sasaran	IKU	Indikator Kinerja Program	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2 Presentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga dan PKRT	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		Percentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	-	-	-	76,92	92,31	-	-	-	76,93	92,31	-	-	-	100	100
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat															
	1	Percentase Standar Bagian Penunjang Sebagai RS pendidikan	-	-	-	50	100	-	-	-	60	100	-	-	-	120	100
	2	Percentase Standar Bagian Penunjang Logistik sebagai RS Pendidikan	-	-	-	50	100	-	-	-	50	100	-	-	-	100	100
	3	Percentase Standar Bagian Penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS Pendidikan	-	-	-	50	100	-	-	--	50	100	-	-	-	100	100
	4	Percentase Standar Bagian Pelayanan sebagai RS Pendidikan	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100

Sasaran	IKU	Indikator Kinerja Program	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		5 Persentase Standar Bagian Pelayanan Medis sebagai RS Pendidikan	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
		6 Persentase Standar Bagian Keperawatan sebagai RS Pendidikan	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
		Percentase Ketercapaian SPM Rumah Sakit	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat															
	1	Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
	2	Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
	3	Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100

Sasaran	IKU	Indikator Kinerja Program	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Standar Pelayanan Minimal															

Sumber: data diolah

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perbandingan pengukuran kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut:

Pada sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Dinas Kesehatan dengan indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah, dapat dijelaskan bahwa realisasi tahun 2023 dan tahun 2024 nilainya sama karena penilaian SAKIP tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten sampai dengan penyusunan dokumen LKIP ini masih dalam tahap penilaian. Sehingga capaian nilai SAKIP Dinas Kesehatan tahun 2024 diasumsikan menggunakan nilai SAKIP tahun 2023. Perbaikan atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2023 telah ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Dinas Kesehatan tahun 2024.

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat terdapat 3 (tiga) indikator yaitu Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting, Rasio Kematian Ibu dan Rasio Kematian Bayi. Indikator Rasio Kematian Bayi apabila pada tahun 2023 target kinerjanya tidak tercapai dengan capaian 93,6% tapi pada tahun 2024 indikator kinerja tersebut tercapai dengan capaian 102,20%. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi perbaikan pelaksanaan kegiatan atau aktivitas yang lebih terfokus untuk menunjang tercapainya target kinerja, diantaranya telah dibuat komitmen Bersama dalam rangka mendukung program penurunan angka kematian ibu dan kematian bayi di Provinsi Banten, diterbitkannya Surat Edaran tentang Upaya Percepatan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Provinsi Banten kepada Kabupaten/Kota. Namun ada beberapa permasalahan yang menyebabkan masih terjadinya kasus kematian ibu dan kematian bayi diantaranya,

masih terdapat Puskesmas yang belum lengkap tim gawat darurat neonatal, masih terdapat RS yang belum terpenuhi NICU, masih terdapat kasus kelahiran yang dilakukan tidak di fasilitas pelayanan Kesehatan. Capaian indikator kinerja cakupan layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitive dalam penurunan stunting baik tahun 2023 maupun tahun 2024 telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini ditunjang oleh pelaksanaan 1) diterbitkannya SK TPPS, 2) pelaksanaan intervensi stunting telah dilaksanakan secara komprehensif, 3) telah dilaksanakan pengadaan dan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi ibu hamil dan remaja putri, 4) pelatihan tatalaksana gizi buruk, konselor ASI eksklusi, dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bagi tenaga Kesehatan, 5) pemberian imunisasi dasar lengkap kepada balita, tersedianya pembiayaan Kesehatan melalui JKN, dan intensif dalam pemberian edukasi kepada Masyarakat.

Pada Sasaran Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan terdapat 2 (dua) indikator yaitu Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan dan Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit. Baik tahun 2023 maupun 2024 seluruh indikator tersebut telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan capaian 100%. Capaian Rumah Sakit Pendidikan diampu oleh UPTD RSUD Banten dengan realisasi target sebesar 92,31% sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 93 Tahun 2015 tentang RS Pendidikan.

Capaian indikator kinerja tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya (tahun 2022 dan sebelumnya) karena Renstra Dinas Kesehatan periode 2019 – 2022 telah selesai seiring dengan berakhirnya massa

bhakti Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Pemilukada serentak yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024, Dinas Kesehatan Menyusun Rencana Strategis (Renstra) transisi 2023-2026.

Capaian target indikator baik indikator sasaran dan indikator program untuk tahun 2024 sesuai dengan dokumen Renstra tercapai berkat kerja keras seluruh pegawai dan mitra Dinas Kesehatan. Diharapkan kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun ini menjadikan pemicu untuk dapat bekerja dengan lebih baik lagi di tahun depan.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstras Dinas Kesehatan

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingakan dengan Target Akhir Renstra 2023 – 2026

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra				Realisasi			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan Dinas Kesehatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70-80	70-80	70-80	70-80	78,5	78,5	-	-
		Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting	Persen	40	50	60	70	66,67	75	-	-
		Rasio Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Rasio	80	79	78	77	69,1	71,7	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat										

No	Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra				Realisasi			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Rasio Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	Rasio	4,7	4,6	4,5	4,4	5,0	4,5	-	-
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Persen	76,92	92,31	100	100	76,93	92,31	-	-
		Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Angka	100	100	100	100	100	100	-	-

Sumber: data diolah

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2023-2026. Realisasi kinerja IKU Dinas Kesehatan tahun 2024 seluruh indikatornya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan. Pada indikator Rasio Kematian Ibu meskipun tergetnya tercapai, namun apabila dilihat dari capaian terjadi penurunan dimana pada tahun 2023 capaian kinerja 66,67% tetapi capaian tahun 2024 sebesar 71,7%. Hal ini menandakan terjadi peningkatakan kasus kematian ibu.

Penilaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 sesuai dengan perhitungan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 masuk dalam kategori **BAIK dengan nilai 94,83**. Meski seluruh target indikator kinerja utama tercapai namun masih terdapat kendala dalam pengumpulan data dukung, khususnya jumlah kelahiran hidup dari Kabupaten/Kota yang membutuhkan waktu pengumpulan data yang lebih lama. Target indikator di Kabupaten/Kota adalah jumlah kematian bayi, sehingga hanya terfokus pada berapa jumlah kematian bayi. Data kelahiran hidup yang proses persalinannya tidak dilaksanakan di fasilitas pelayanan Kesehatan masih sangat sulit didapatkan.

4. Membandingkan Realiasi Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Nasional

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan secara optimal diharapkan dapat mencapai sasaran daerah yaitu Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Provinsi Banten dengan target pada dokumen RPD Tahun 2023 yaitu 70,54. Menurut data yang dirilis oleh BPS Provinsi Banten, UHH Provinsi Banten tahun 2024 adalah 71,02. Artinya rata-rata usia hidup maksimal masyarakat banten mencapai 71,02 tahun. AHH Provinsi Banten tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2022 yaitu sebesar 70,77, walau tidak signifikan kenaikannya hal ini dapat mencerminkan bahwa telah terjadi peningkatan pembangunan bidang Kesehatan di Provinsi Banten. Berikut adalah rincian AHH masing-masing Kabupaten/kota:

Tabel 3.12
Angka Harapan Hidup Provinsi Banten Tahun 2020 - 2024

No	Kab/Kota	2024	2023	2022	2021	2020
1	Kab. Pandeglang	65,79	65,58	65,20	64,79	64,66
2	Kab. Lebak	68,34	68,13	67,74	67,33	67,21
3	Kab. Serang	65,90	65,60	65,18	64,76	66,70
4	Kab. Tangerang	70,88	70,65	70,28	69,93	69,89
5	Kota Cilegon	67,66	67,39	67,02	66,69	66,67
6	Kota Tangerang	72,46	72,24	71,91	71,60	71,60
7	Kota Serang	69,27	68,98	68,54	68,12	68,00
8	Kota Tangsel	73,21	72,11	72,78	72,47	72,47
Provinsi		71,02	70,77	70,02	70,39	70,02

Sumber; BPS Prov. Banten

Tabel 3.13
Perbandingan Capain Indikator Tujuan Daerah dengan
Capaian Nasional

Indikator Kinerja	Prov Banten	Indonesia
Angka Harapan Hidup	71,02	72,39

Sumber; BPS Prov. Banten

Angka Harapah Hidup Provinsi Banten pada tahun 2024 sebesar 71,02 masih sangat jauh tertinggal dengan Angka Harapan Hidup rata- rata Nasional yaitu sebesar 72,39. Untuk dapat meningkatkan kualitas akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan di wilayah Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Provinsi Banten berencana mengoperasionalkan 2 Rumah Sakit di Banten Selatan pada tahun 2025, yaitu RSUD Cilongrang dan RSUD Labuan diharapkan dapat meningkatkan akses dan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Banten khususnya wilayah Banten Selatan. Sehingga angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular dapat diturunkan; dan jumlah kematian ibu dan kematian bayi dapat menurun. Promosi Kesehatan harus lebih gencar lagi dilakukan khususnya terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) agar Masyarakat Banten memiliki budaya hidup sehat untuk mengurangi ancaman terjangkitnya penyakit menular dan tidak menular, serta pemberian ASI ekslusif kepada Bayi dan pemberian imunisasi lengkap merupakan kebutuhan dasar yang bersifat wajib bagi keberlangsungan hidup anak.

Unutuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Banten selain faktor bidang Kesehatan, diperlukan struktur ekonomi yang Tangguh yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi daerah, factor inflasi yang dapat ditekan, angka pengangguran yang rendah, angka kemiskinan yang rendah,

factor Pendidikan masyarakat yang tinggi dan kondisi lingkungan yang memadai. Angka harapan hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk disuatu wilayah.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari hasil Analisa laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, maka dapat dinyatakan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah berhasil mencapai target dan tujuan organisasi.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal organisasi. Adapun faktor internal dan eksternal keberhasilan tersebut antara lain disebabkan oleh:

- a. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan;
- b. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan untuk kinerja tahun 2024;
- c. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai;
- d. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, setiap anggaran yang telah dikeluarkan dapat menghasilkan kinerja yang optimal;
- e. Telah dilakukannya evaluasi perbulan atas pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi keuangan maupun realisi fisiknya, hal ini dimungkinkan untuk dapat melakukan perbaikan apabila

terdapat kegiatan yang tidak focus pada hasil;

- f. Optimalnya koordinasi dengan berbagai *stakeholder* baik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Vertikal teknis, OPD teknis mitra Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi maupun Organisasi Masyarakat dan Masyarakat secara luas. Sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran;
- g. Yang terpenting adalah adanya sinergitas program/kegiatan baik antara Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten maupun dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan
- h. Kualitas dan kompetensi SDM yang semakin meningkat menjadi kekuatan potensial untuk menghasilkan kinerja yang optimal.

Selain 92actor penunjang keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja, tentu ada 92actor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan program yang tentu saja dapat memengaruhi pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan. Data jumlah kelahiran hidup yang proses kelaiharannya bukan di fasilitas pelayanan Kesehatan masih sulit didapatkan. Diperlukan kerja sama dengan Disdukcapil dan BPS dalam menghitung jumlah kelahiran hidup tiap tahunnya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu sumber daya biaya (anggaran) dan sumber daya manusia.

Tabel 3.14
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Tahun Anggaran 2024

No	Keterangan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentasi (%)
1.	Dinas Kesehatan	621.105.756.713,00	614.224.861.716,00	98,91
2.	UPTD.Labkesda	12.420.004.139,00	13.376.983.794,00	99,68
3.	UPTD.Upelkes	3.336.634.184,00	3.171.142.353,00	95,04
4.	APBD RS Banten	151.590.732.122,00	148.430.269.108,00	97,92
5.	BLUD RS Banten	186.946.724.272,00	185.660.128.071,00	99,31
6.	APBD RS Malingping	97.398.192.935,00	97.103.134.541,00	99,69
7.	BLUD UPT.RS Malingping	59.487.028.205,00	59.449.208.976,00	99,94
	Total	1.113.195.072.570,00	1.121.415.728.559,00	98,96

Dilihat dari tabel di atas, penggunaan anggaran Dinas Kesehatan pada Tahun 2024 sangat efisien karena serapan anggaran mencapai 98,96%. Jika lakukan analisis realisasi penggunaan anggaran dengan realisasi capaian kinerja, maka Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada tahun 2024 sudah sangat baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, dengan tercapainya seluruh indikator kinerja utama, indikator kinerja program, dan indikator sub kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja dan optimalnya dalam realisasi anggaran.

Untuk efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi menggunakan tenaga ahli yaitu Tim Pengelolaan Website Media Sosial Siniar (Podcast) sehingga masyarakat lebih memahami promosi publikasi atau edukasi yang

disampaikan, kerjasama dengan DPRD Provinsi Banten dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sebagai Narasumber, tenaga ahli dari Organisasi Profesi seperti PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi) untuk melaksanakan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau efeknya langsung dirasakan masyarakat khususnya dalam pengentasan stunting di Provinsi Banten.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Program Dinas Kesehatan Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran	IKU	Program dan Kegiatan		Targe t	Realisasi	Capaia n (%)
2	3	4		6	7	8
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa						
Meningkatny a kinerja pelayanan pemerintahan Dinas Kesehatan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
		1	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100
		2	Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Labkesda	100	100	100
		3	Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100	100	100
		4	Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Banten	100	100	100

Tujuan/ Sasaran	IKU	Program dan Kegiatan		Targe t	Realisas i	Capaia n (%)
		2	3	4	6	7
		5	Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Malingping	100	100	100
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia						
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
	1	Cakupan Kualitas Keluarga Sehat	57	87	153	
	2	Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban)	86	94	109,30	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
	1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (Kelompok Masyarakat)	14	14	100	
	Rasio Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
	Rasio Kematian Bayi (per 10.000 kelahiran hidup)	1	Presentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	100	100	100
		2	Presentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	100	100	100
		3	Presentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	100	100
		4	Percentase Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin	100	100	100
		5	Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	239	261	105,4
		6	Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,14	0,134	100

Tujuan/ Sasaran	IKU	Program dan Kegiatan		Targe t	Realisas i	Capai a n (%)
		2	3	4	6	7
		7	Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	79,37	94,78	119,24
		8	Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100	100	100
		9	Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi	123	126	102,44
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
		1	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan	470	470	100
		2	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat pada UPTD Pelatihan Kesehatan	420	449	106,9
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman				
		1	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan	100	100	100
			Presentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga dan PKRT	100	100	100
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
		1	Persentase Standar Bagian Penunjang Sebagai RS pendidikan	100	100	100
		2	Persentase Standar Bagian Penunjang Logistik sebagai RS Pendidikan	100	100	100
		3	Persentase Standar Bagian Penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS Pendidikan	100	100	100
		4	Persentase Standar Bagian Pelayanan sebagai RS Pendidikan	100	100	100
		5	Persentase Standar Bagian Pelayanan Medis sebagai RS Pendidikan	100	100	100
		6	Persentase Standar Bagian Keperawatan sebagai RS Pendidikan	100	100	100
	Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
			Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD	100	100	100

Tujuan/ Sasaran	IKU	Program dan Kegiatan		Targe t	Realisas i	Capaia n (%)
		2	3	4	6	7
			sesuai Standar Pelayanan Minimal			
			Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	100	100
			Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	100	100

Sumber: data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat Capaian Indikator Kinerja Program pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan tercapai, baik di Dinas Induk, UPTD Labkesda, UPTD Pelatihan Kesehatan dan dua UPTD RSUD yaitu RSUD Banten dan RSUD Malingping.

Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat seluruh target terealisasi dengan sangat baik, hal tersebut karena:

- Pada Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa provinsi tercapai karena Koordinasi program yang kuat dengan Kabupaten / Kota dengan dukungan tim yang sudah terlatih di bidang programnya di antaranya program KLB dan Krisis Kesehatan, bekerja sama dengan Dinkes Kabupaten / Kota untuk Melakukan edukasi dan monitoring dan di lakukan secara terus menerus dengan sasaran masyarakat umum, dan mengevaluasi Pencapaian Program
- Pada Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi Sanitasi (Jamban) dapat tercapai dengan sangat baik karena kolaborasi dengan berbagai pihak (TSL Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, POKJA PKP, CSR, dan

masyarakat), Dukungan anggaran (APBD Kabupaten / Kota, DAK Stunting Provinsi, PU, BPPW, DJPK, CSR & ll) dan adanya kebijakan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, adanya target terkait sanitasi

- Pada persentase jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dapat tercapai karena telah adanya koordinasi yang baik antara Dinas kesehatan dan Dinas Sosial se-Provinsi Banten dalam pembiayaan masyarakat miskin baik dari anggaran APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sehingga pembaharuan data masyarakat miskin yang belum memiliki JKN dapat segera ditindaklanjuti
- Rasio ketersediaan tempat tidur dapat tercapai targetnya sebagai hasil upaya Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang secara aktif dan berkesinambungan mendorong setiap rumah sakit se Provinsi Banten untuk menyediakan jumlah tempat tidur sesuai standar kelas rumah sakit, baik melalui pertemuan sosialisasi dengan mengundang setiap rumah sakit se Provinsi Banten maupun monitoring evaluasi secara langsung ke rumah sakit pada saat rekomendasi perijinan rumah sakit
- Persentase pemenuhan obat publik dan perbekalan kesehatan tercapai karena Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengoptimalkan proses negosiasi dengan penyedia dan monitoring evaluasi kepada penyedia terkait ketersediaan obat serta melakukan peningkatan akurasi penyusunan rencana kebutuhan obat dengan mempertimbangkan morbiditas dan memanfaatkan anggaran yang tersedia, serta penguatan koordinasi kebutuhan obat antara bagian Farmasi dan bagian program
- Persentase rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi dan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dapat

tercapai berkat Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang telah secara optimal melaksanakan pemetaan sekaligus pengawasan terhadap rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang belum terakreditasi dan akan habis masa berlaku akreditasinya. Dinas Kesehatan Provinsi Banten bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Asosiasi perumah sakitan melaksanakan pembinaan terhadap rumah sakit baik melalui pertemuan dengan mengundang rumah sakit dan Fasilitas pelayanan kesehatan primer maupun melalui kredensialing dengan BPJS Kesehatan. Selain itu peraturan yang mensyaratkan Fasilitas pelayanan kesehatan baik primer maupun rujukan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan telah mendorong setiap fasyankes secara aktif melaksanakan akreditasi dan mempertahankan mutu pelayanannya

- Pada UPTD Labkesda Provinsi Banten dengan target peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi sebanyak 123 parameter, terealisasi sebanyak 126 parameter. Hal tersebut dicapai karena Labkesda Provinsi Banten telah meningkatkan fasilitas dan peralatan yang dapat mendukung penambahan parameter pemeriksaan dan SDM kesehatan yang terlatih. Selain itu dengan capaian akreditasi Labkesda Provinsi Banten baik oleh KALK maupun KAN secara tidak langsung meningkatkan parameter pemeriksaan dan mutu pemeriksaan yang meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa Labkesda Provinsi Banten.

Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan seluruh target terealisasi dengan sangat baik, hal tersebut karena:

- Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah memanfaatkan SISDMK

(Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) agar dapat mengetahui kekosongan tenaga kesehatan di Fasyankes khususnya di Puskesmas

- Dinas Kesehatan Provinsi Banten melalui penempatan dan pendistribusian tenaga kesehatan penugasan khusus telah membantu Puskesmas di Kabupaten / Kota yang memiliki kekurangan tenaga kesehatan baik dokter, perawat, apoteker maupun bidan
- Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah melaksanakan koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Puskesmas terkait kebutuhan tenaga kesehatan yang diperlukan, Puskesmas khususnya telah sangat pro aktif dalam melaporkan tenaga kesehatan khusus yang telah ditempatkan dan jika ada tenaga kesehatan yang kurang di Puskesmas tersebut
- Pada UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Banten dengan target 420 orang terealisasi 449 orang, capaian tersebut karena semakin solid nya jejaring antara Upelkes dengan pemegang program kegiatan di Kabupaten / Kota terkait peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, dilakukan peningkatan sarana prasarana yang mendukung mutu pelatihan di upelkes sehingga peserta pelatihan semakin antusias mengikuti pelatihan di Upelkes, semakin matangnya persiapan dalam pelaksanaan pelatihan sesuai jadwal dengan target peserta yang telah ditentukan serta tingginya minat dan partisipasi peserta Pelatihan yang diselenggarakan oleh UPTD Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman tahun 2024 seluruh target terealisasi dengan sangat baik, hal tersebut karena:

- Sarana yang dibina dan diawasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam periode 2024, sehingga target dan realisasi mudah dicapai
- Kegiatan yang dilakukan mendukung percepatan pelayanan perizinan, sesuai peran Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian
- Dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dibuat sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan regulasi terbaru.
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan tahun 2024 seluruh target terealisasi dengan sangat baik, hal tersebut karena:

- Dinas Kesehatan Provinsi Banten secara aktif dan berkesinambungan menjalin kerjasama yang solid dengan kelompok masyarakat yang telah melaksanakan kerjasama sejak tahun 2024 (14 kelompok masyarakat)
- Dinas Kesehatan Provinsi Banten secara pro aktif melaksanakan koordinasi yang efektif melalui Focus Group Discussion dengan kelompok masyarakat, melibatkan organisasi profesi dan terus melaksanakan pembinaan termasuk dengan melibatkan DPRD Provinsi Banten

3.2 Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan

Pagu murni Dinas Kesehatan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp.1.162.691.308.183,00 berkurang sebesar Rp.29.496.235.613,00 pada Perubahan APBD Tahun 2024 menjadi Rp.1.133.195.072.570,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.16
Alokasi Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	Keterangan	Pagu Murni	+/(-)	Pagu Perubahan
1	Dinas Induk	749.785.539.086,00	(128.769.782.373,00)	621.015.756.713,00
2	UPTD Pelatihan Kesehatan	3.772.716.300	(436.082.116,00)	3.336.634.184,00
3	UPTD LABKESDA	8.523.697.420,00	4.896.306.719,00	13.420.004.139,00
4	RSUD Malingping	137.987.936.653,00	18.897.284.487,00	156.885.221.140,00
5	RSUD Banten	262.621.418.724,00	75.916.037.670,00	338.537.456.394,00
Jumlah Pagu		1.162.691.308.183,00	(29.496.235.613,00)	1.133.195.072.570,00

Sumber; Data diolah

Tabel 3.17
Realisasi Belanja Tahun 2024

No	Keterangan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentasi (%)
1.	Dinas Kesehatan	621.015.756.713,00	614.224.861.716,00	98,91
2.	UPTD.Labkesda	13.400.004.139,00	13.376.983.794,00	99,68
3.	UPTD.Upelkes	3.336.634.184,00	3.171.142.353,00	95,04
4.	APBD RS Banten	151.590.732.122,00	148.430.269.108,00	97,92
5.	BLUD RS Banten	186.946.724.272,00	185.660.128.071,00	99,31
6.	APBD RS Malingping	97.398.192.935,00	97.103.134.541,00	99,94
7.	BLUD UPT.RS Malingping	59.487.028.205,00	59.449.208.976,00	99,94
Total		1.133.195.072.570,00	1.121.415.728.559,00	98,96

Sumber; Data diolah

Tabel 3.18
Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Tahun 2024

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)		
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100		100,00		100,00		
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	313.448.560,00	3	313.148.400,00	100,00	99,90	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	8.169.200,00	1	8.169.200,00	100,00	100,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	6.158.000,00	1	6.158.000,00	100,00	100,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	10.977.200,00	1	10.977.200,00	100,00	100,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	10.977.200,00	1	10.977.200,00	100,00	100,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	5.440.000,00	12	5.440.000,00	100,00	100,00	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	228.772.000,00	3	228.329.000,00	100,00	99,81	
15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (UPT RSUD Malingping)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	18.374.240,00	6	18.374.240,00	100,00	100,00	

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
	16	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	8.476.000,00	1	8.476.000,00	100,00	100,00
	17	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	8.476.000,00	1	8.476.000,00	100,00	100,00
	18	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	8.052.000,00	1	8.052.000,00	100,00	100,00
	19	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	8.052.000,00	1	8.052.000,00	100,00	100,00
	20	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	91.649.600,00	12	91.649.600,00	100,00	100,00
	21	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	14.424.000,00	5	14.424.000,00	100,00	100,00
B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216	40.342.865.835,00	216	39.902.478.542,00	100,00	98,91
	23	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	977.940.000,00	1	977.940.000,00	100,00	100,00
	24	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	13.000.000,00	4	13.000.000,00	100,00	100,00
	25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	49.219.200,00	4	49.173.200,00	100,00	99,91
	26	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	24.910.000,00	2	24.910.000,00	100,00	100,00
	27	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (UPT RSUD Banten)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (satuan: orang)	219	65.354.440.000,00	219	64.858.928.869,00	100,00	99,24
	34	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99	29.370.834.000,00	99	29.208.293.983,00	100,00	99,45

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
	35	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	310.680.000,00	12	310.680.000,00	100,00	100,00
	36	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	3	9.398.400,00	3	9.398.400,00	100,00	100,00
	37	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	142.620.000,00	2	142.619.840,00	100,00	99,99
	38	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	3.150.000,00	1	3.149.760,00	100,00	99,99
C	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah								
	39	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	26.400.000,00	4	26.400.000,00	100,00	100,00
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	40	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya	jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	214.535.000,00	3	214.535.000,00	100,00	100,00
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	43	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	125.897.500,00	1	125.897.500,00	100,00	100,00
	44	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	1.397.071.700,00	3	1.389.448.900,00	100,00	99,45
	45	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	1.011.531.000,00	3	1.008.182.400,00	100,00	99,67
	46	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	903.989.000,00	4	903.602.900,00	100,00	99,96
	47	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	889.042.000,00	3	887.351.500,00	100,00	98,81
	48	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	1.913.162.000,00	2	1.913.159.952,00	100,00	100,00
	49	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	34.515.000,00	1	34.515.000,00	100,00	100,00

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		Kinerj a	Keuangan	Kinerj a	Keuangan	Kinerj a	Keua ngan
50	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD LABKESDA)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 15.511.000,00	1	15.511.000,00	100,00	100,00
51	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPTD LABKESDA)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 170.816.200,00	1	170.715.309,00	100,00	99,94
52	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD LABKESDA)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	1 98.640.000,00	1	98.640.000,00	100,00	100,00
53	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD LABKESDA)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 37.175.100,00	3	37.171.000,00	100,00	99,99
55	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PELKES)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 9.655.000,00	1	9.598.000,00	100,00	99,50
56	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PELKES)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	1 118.190.000,00	1	117.604.000,00	100,00	99,41
57	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPTD PELKES)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 27.488.000,00	1	27.226.670,00	100,00	99,05
58	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PELKES)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 30.300.000,00	1	30.300.000,00	100,00	100,00
59	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD PELKES)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 18.932.000,00	1	18.932.000,00	100,00	100,00
60	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PELKES)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 147.780.000,00	1	147.780.000,00	100,00	100,00
61	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT RSUD Banten)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 150.000.000,00	1	144.618.250,00	100,00	96,41
61	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 273.238.225,00	1	272.984.925,00	100,00	99,91
56	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	1 755.767.500,00	1	755.068.090,00	100,00	99,91
67	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 48.592.400,00	2	48.582.000,00	100,00	99,98
68	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 876.382.300,00	1	874.668.160,00	100,00	99,80

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
	69	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	272.760.000,00	12	272.751.588,00	100,00	100,00
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11	1.218.320.000,00	11	1.218.320.000,00	100,00	100,00
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8	5.402.000.000,00	8	5.401.200.000,00	100,00	99,99
	70	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	24.491.600.920,00	12	24.482.142.920,00	100,00	97,99
	71	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	6.874.460.420,00	7	6.825.317.423,00	100,00	99,29
	73	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD LABKESDA)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18	127.520.000,00	18	127.365.000,00	100,00	99,88
	75	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PELKES)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	1.031.910.684,00	12	1.030.828.000,00	100,00	99,90
	78	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	25.500.000,00	8	25.500.000,00	100,00	100,00
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	1.800.000,00	1	-	0,00	0,00
	79	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17	614.716.000,00	17	614.716.000,00	100,00	100,00
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	80	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.167.941.005,00	12	2.167.091.981,00	100,00	99,96
	81	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	14.305.638.524,00	12	14.290.034.369,00	100,00	99,89

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
	82	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD LABKESDA)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	549.202.894,00	12	537.527.363,00	100,00	97,87
	83	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD LABKESDA)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3.592.727.120,00	12	3.583.754.494,00	100,00	99,75
	84	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PELKES)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	112.149.500,00	12	110.030.664,00	100,00	98,11
	85	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD PELKES)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	438.674.400,00	12	437.569.464,00	100,00	99,75
	86	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT RSUD Banten)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	900.000.000,00	3	899.997.000,00	100,00	100,00
	87	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT RSUD Banten)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	35.219.361.629,00	1	33.451.285.476,00	100,00	94,98
	88	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1.952.428.200,00	12	1.952.272.742,00	100,00	99,99
	89	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	24.010.205.588,00	12	23.946.801.110,00	100,00	99,74
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	90	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	76.820.000,00	2	76.472.000,00	100	99,55
	91	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	1.564.637.200,00	50	1.555.785.070,00	100	99,43
	92	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	1.031.456.400,00	10	1.026.968.800,00	100	99,56
	93	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	1.288.448.774,00	4	1.283.340.108,00	100	99,60

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
	94	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	595.675.182,00	1	595.675.182,00	100	100
	95	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1.181.573.000,00	1	1.171.332.890,00	100	99,13
	96	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD LABKESDA)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	308.848.000,00	14	308.848.000,00	100,00	99,86
	97	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD LABKESDA)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	127	100.595.000,00	127	100.595.000,00	100,00	100,00
	98	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD LABKESDA)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	136.983.000,00	1	135.921.390,00	100,00	99,23
	99	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD LABKESDA)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	72.212.000,00	1	72.069.000,00	100,00	99,80
	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PELKES)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	177.790.000,00	9	176.285.750,00	100,00	99,15
	101	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PELKES)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	40.906.000,00	3	40.846.000,00	100,00	99,85
	102	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD PELKES)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	70.700.000,00	1	70.669.305,00	0	99,96
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT RSUD Banten)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125	100.000.000,00	125	96.680.000,00	100	96,68
	105	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT RSUD Banten)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	976.885.000,00	1	878.754.500,00	100	89,95
	106	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26	670.820.000,00	26	670.141.827,00	100	99,90

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
	107	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125	335.662.800,00	125	335.556.550,00	100	99,97
	108	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	199.200.000,00	2	198.231.848,00	100	99,51
	109	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49	375.518.000,00	49	375.266.620,00	100	99,93
Peningkatan Pelayanan BLUD									
	110	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT RSUD Banten)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	186.946.724.272,00	1	185.660.128.071,00	100,00	99,31
	111	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	59.487.028.205,00	1	59.449.208.976,00	100,00	99,94
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
			Cakupan Kualitas Keluarga Sehat (%)	57		87		152,63	
			Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban) (%)	86		94		109,40	
			Ketersediaan Fasilitas pelayanan 110olusi110ka 110olusi110 Provinsi yang bermutu (unit)	239		261		109,21	
			Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	100		100,00		100,00	
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana (%)	100		100,00		100,00	
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Beresiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (%)	100		100,00		100,00	

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
			Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (%)	100		100,00		100,00	
			Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (%)	100		100,00		100,00	
			Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi (%)	79,37		94,78		119,42	
			Rasio Daya Tampung RS Rujukan (Rasio)	0,14		0,14		100,00	
			Peningkatan jumlah parameter laboratorium 111olusi111ka dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi (parameter)	123		126		102,44	
			Persentase Standar Bagian Pelayanan sebagai RS Pendidikan	100		100,00		100,00	
			Persentase Standar Bagian Penunjang sebagai RS Pendidikan	100		100,00		100,00	
			Persentase Standar Bagian Penunjang Logistik sebagai RS Pendidikan	100		100,00		100,00	
			Persentase Standar Bagian Pelayanan Medis sebagai RS Pendidikan	100		100,00		100,00	
			Persentase Standar Bagian Pelayanan Keperawatan sebagai RS Pendidikan	100		100,00		100,00	
			Persentase Standar Bagian Penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS Pendidikan	100		100,00		100,00	
			Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100		100,00		100,00	
			Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100		100,00		100,00	
			Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100		100,00		100,00	

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
I	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan alat 112olusi112ka untuk UKP rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								
	112	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (unit)	1	13.148.262.000,00	1	13.148.262.000,00	100,00	100,0
		Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Paket Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang disediakan	2	3.652.997.617,00	2	3.524.131.265,00	100,00	96,47
	114	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, BahanMedis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, BahanMedis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	1	8.511.321.425	1	8.510.292.025	100,00	99,99
	115	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Paket Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4	75.299.347.220,00	4	74.847.514.996,00	100,00	99,40
	117	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD LABKESDA)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (unit)	2	836.293.241,00	2	829.240.041,00	100,00	99,16
	118	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi (UPTD LABKESDA)	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	11	977.467.278,00	11	976.875.143,00	100,00	99,94
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (UPTD LABKESDA)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	11	5.115.800.220,00	11	5.105.263.920,00	100,00	99,79
	119	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (UPTD LABKESDA)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan (paket)	29	1.280.213.086,00	29	1.277.488.034,00	100,00	99,79

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
	120	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT RSUD Banten)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2	5.225.000.000,00	2	4.955.186.831,00	100,00	94,84
	122	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (UPT RSUD Banten)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	5	4.356.986.000,00	5	4.347.132.780,00	89,09	99,77
	123	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (UPT RSUD Banten)	Jumlah Paket Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4	35.206.059.493,00	4	34.698.326.202,00	98,50	98,56
	12	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit (UPT RSUD Banten)	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	2235	1.900.000.000,00	2235	1.899.709.200,00	99,99	99,98
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	3	441.120.210,00	3	441.120.210,00	100,00	100,00
	127	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	6	11.896.940.395,00	6	11.835.713.193,00	100,00	99,49
	129	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	62	2.508.974.320,00	62	2.508.248.075,00	100,00	99,97
	130	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	6	438.402.752,00	6	438.402.752,00	100,00	100,00
	133	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (UPT RSUD Banten)	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	6	20.973.829.365,00	6	20.971.514.288,00	100,00	99,99
J	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								
	134	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	500	78.852.000,00	500	78.732.000,00	100,00	99,85

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
	135	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	300	246.058.000,00	300	245.987.050,00	100,00	99,97
	136	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	3	1.273.345.000,00	3	1.273.079.350,00	100,00	99,98
	137	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (dokumen)	1	38.913.000,00	1	38.913.000,00	100,00	100,00
	138	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	2	11.738.948.000,00	2	6.374.270.350,00	100,00	54,30
	139	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (dokumen)	8	403.838.800,00	8	403.468.800,00	100,00	99,91
	140	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	8	1.581.039.200,00	8	1.578.830.850,00	100,00	99,86
	141	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (dokumen)	2	800.947.440,00	2	792.034.940,00	100,00	98,89
	142	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	11	3.345.718.000,00	11	3.322.617.170,00	100,00	99,31
	143	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (dokumen)	8	94.701.600,00	8	94.261.600,00	100,00	99,54
	136	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (dokumen)	7	1.445.548.000,00	7	1.439.024.000,00	100,00	99,55
	137	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis (orang)	189	437.100.000,00	189	434.910.000,00	100,00	99,50

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
	138	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (dokumen)	3	365.156.666.600,00	3	365.142.585.700,00	100,00	100,00
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan		361.952.000,00		361.451.000,00	100,00	99,86
	139	umlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (dokumen)	2	472.379.600,00	2	471.215.600,00	100,00	99,75
	140	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (dokumen)	3	160.976.800,00	3	160.572.640,00	100,00	99,75
	141	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota (dokumen)	8	405.780.000,00	8	404.700.000,00	100,00	99,73
	142	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	7	26.580.000,00	7	26.580.000,00	100,00	100,00
	149	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	25	376.612.000,00	25	376.612.000,00	100,00	100,00
	150	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7	260.696.640,00	7	260.696.640,00	100,00	100,00
	151	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	87.664.000,00	1	87.664.000,00	100,00	100,00
K	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
	154	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (unit)	106	500.164.000,00	106	493.343.000,00	100,00	98,64
	155	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (unit)	40	5.487.966.000,00	40	5.389.143.584,00	100,00	98,20
L	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								
	157	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (UPT RSUD Banten)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (satuan : dokumen)	1	1.702.000.000,00	1	1.701.900.000,00	100,00	99,99
	159	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	5.376.000,00	1	5.376.000,00	100,00	100,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
			Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan (orang)	470		470,00		100,00	
			Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat pada UPT Pelatihan Kesehatan (orang)	420		420		100,00	
M	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi								
	160	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (orang)	287	22.277.431.016,00	287	22.163.473.184,00	100,00	99,49
	161	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi (orang)	287	453.383.000,00	287	452.617.000,00	100,00	99,83

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
	162	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (orang)	420	810.631.600,00	420	679.688.500,00	100,00	83,85
	163	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (dokumen)	8	301.527.000,00	8	273.784.000,00	100,00	90,80
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN									
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan (persen)	100		100		100,00	
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT	100		100		100,00	
N	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)								
	164	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan (sarana)	50	1.001.521.000,00	50	998.934.000,00	100,00	99,74
	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)								
	165	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (sarana)	50	92.508.000,00	50	92.328.000,00	100,00	99,81
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
	166		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (kelompok 118olusi118kat)	14		14		100,00	
O	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi								
	167	<i>Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (dokumen)</i>	2	869.386.000,00	2	867.836.000,00	100,00	99,82
P	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi								
	168	<i>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (dokumen)</i>	2	1.377.655.000,00	2	1.377.630.000,00	100,00	100,00

Sumber; Data diolah

Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada Tahun anggaran 2024 melaksanakan 5 Program, 16 Kegiatan dan 168 Sub Kegiatan tersebar di Dinas Induk, UPTD Labkesda, UPTD Pelatihan Kesehatan, UPTD RSUD Banten, dan UPTD RSUD Malingping, dengan pagu anggaran

APBD Perubahan sebesar Rp,1.133.195.072.570,00 dengan realisasi anggaran sebesar 98,96% atau sebesar Rp.1.121.415.728.559,00. Berikut ini disampaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan pada Tahun Anggaran 2024 dan solusi untuk tahun anggaran berikutnya pada Sub Kegiatan dengan kinerja keuangan kurang dari 90%:

1. Dinas Induk

a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, realisasi 54,30%

Pada sub kegiatan ini terdapat silpa dari pengadaan pemberian makanan tambahan bergizi untuk program penurunan stunting, hal ini disebabkan Kabupaten/Kota juga mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Kementerian Kesehatan sehingga anggara Dinas Kesehatan Provinsi Banten hanya untuk mengkover sasaran yang tidak teranggarkan.

2. UPTD Pelatihan Kesehatan

a) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Pada sub kegiatan ini terdapat silpa dari belanja honorarium penyelenggaraan pelatihan Kesehatan. Hal ini disebabkan keterbatasan jadwal dari widyaiswara atau narasumber dari Kemenkes untuk dapat mengajak di UPTD Pelatihan Kesehatan dan terbatasnya Widyaiswara bidang Kesehatan pada BPSDM Provinsi Banten.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2024. Capaian Kinerja (*performance result*) Tahun 2024 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisa atas capaian kinerja tahun 2024 dapat dijadikan sebagai untuk perbaikan kinerja organisasi di masa akan datang.

Penilaian Kinerja Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Banten sesuai dengan perhitungan Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi mendapatkan nilai 94,83 dan masuk dalam kategori BAIK. Yang artinya Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten sudah sangat baik dan sesuai dengan ekspektasi.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Meski secara umum kinerja Dinas Kesehatan masuk dalam kategori sangat baik, namun masih terdapat tantangan dan perlu dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Langkah-langkah rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Terus berupaya mempertahankan dan memperbaiki kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan
2. Melakukan koordinasi internal yang intensif agar terdapat perbaikan kinerja

3. Melakukan koordinasi dengan OPD mitra terkait capaian kinerja PD yang bersinggungan dengan OPD lainnya agar capaian kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatnya

Demikian yang dapat Kami susun, semoga Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2024 dapat mendukung dalam penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Banten.

L A M P I R A N



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. dr. Hj. ATI PRAMUDJI HASTUTI, M.A.R.S**

Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

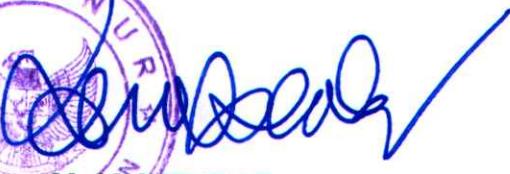
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

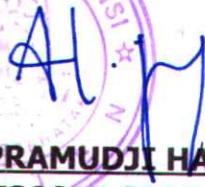
Adapun lampiran pada Perjanjian Kinerja ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Serang, 2024

Pihak Kedua,


AL MUKTABAR

Pihak Pertama,


Dr. dr. Hj. ATI PRAMUDJI HASTUTI, M.A.R.S
NIP. 19730815 200312 2 005

SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN

DPPA TA-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/ RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,50	70-80	70-80	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting	Komponen Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang Mencapai Target Dibagi Total Komponen Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif Dikali 100%	Persen	66,6	50	66,6	Target berubah sesuai dengan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024
		Rasio Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah Kematian Ibu pada saat hamil, bersalin dan nifas dibandingkan dengan 100.000 kelahiran hidup	Rasio	69,1	80	80	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
		Rasio Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	Jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 1 tahun dibandingkan dengan 1000 kelahiran hidup	Rasio	5	4,6	4,6	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
3	Meningkatkan Akses dan Mulu Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Jumlah Persyaratan RS Pendidikan yang Terpenuhi dibagi Suluruh Pesyaratan Rumah Sakit Pendidikan dikali 100 Persen	Persen	76,93	92,31	92,31	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/ RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
4	Meningkatkan Akses dan Mulu Pelayanan Kesehatan	Percentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Jumlah Indikator SPM Rumah Sakit yang Tercapai dibagi Jumlah Variabel Indikator Standar SPM Rumah Sakit dikali 100 Persen	Persen	100	100	100	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	195.800.000.000	223.000.000.000	27.200.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	193.622.000.000	221.025.453.033	27.403.453.033
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.178.000.000	1.974.546.967	(203.453.033)
	JUMLAH	195.800.000.000	223.000.000.000	27.200.000.000

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/ PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.162.691.308.183	1.133.195.072.570	(29.496.235.613)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	612.875.797.908	525.682.514.077	(87.193.283.831)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	519.478.353.691	580.328.515.877	60.850.162.186
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	27.639.731.584	23.842.972.616	(3.796.758.968)
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	593.160.000	1.094.029.000	500.869.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN	2.104.265.000	2.247.041.000	142.776.000

KODE	URUSAN/ PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
	MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
	JUMLAH	1.162.691.308.183	1.133.195.072.570	(29.496.235.613)

Pj. GUBERNUR BANTEN,



KEPALA DINAS KESEHATAN,



Dr. dr. Hj. ATI PRAMUDJI HASTUTI, M.A.R.S
NIP. 19730815 200312 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. dr. Hj. ATI PRAMUDJI HASTUTI, MARS**

Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

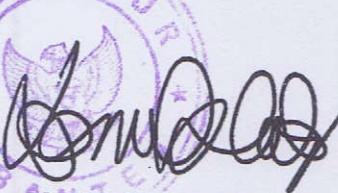
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2024

Pihak Kedua,


AL MUKTABAR

Pihak Pertama,


Dr. dr. Hj. ATI PRAMUDJI HASTUTI, MARS
NIP. 19730815 200312 2 005

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting	Persen	50
		Rasio Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Rasio	80
		Rasio Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	Rasio	4,6
3	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Persen	92,31
4	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Persen	100
SASARAN INTERNAL				
1	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berdampak di Pemerintah Provinsi Banten	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan RB berdampak sesuai dengan fokus masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100
		Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	95

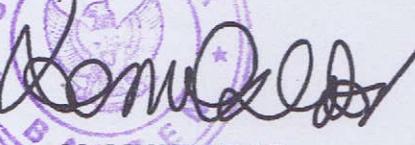
PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	195.800.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	193.622.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.178.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	195.800.000.000

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.162.691.308.183
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	612.875.797.908
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	519.478.353.691
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	27.639.731.584
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	593.160.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.104.265.000
	JUMLAH BELANJA	1.162.691.308.183

Pj. GUBERNUR BANTEN,



AL MUKTABAR

KEPALA DINAS KESEHATAN,



Dr. dr. Hi. ATI PRAMUDJI HASTUTI, MARS
NIP. 19730815 200312 2 005



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Banten Telepon (0254) 7039946, Faksimile (0254) 267041
Laman www.inspektorat.bantenprov.go.id, Pos-el inspektorat@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

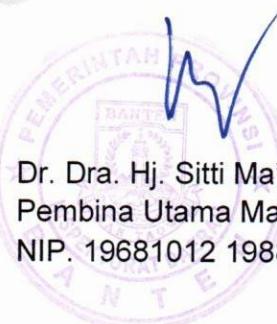
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 28 Februari 2025

Plt. Inspektur Daerah,



Dr. Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681012 198803 2 003

Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penuruan Stunting

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mendapatkan tambahan asupan gizi	90%	67,27%	74,74
2	Ibu hamil mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan	80%	95,33%	119,16
3	Remaja putri mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	58%	91,91%	158,46
4	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	80%	83,8%	104,75
5	Anak usia 6-23 bulan mendapat MP-ASI	80%	90%	112,5
6	Balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	90%	98,9%	106,88
7	Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	90%	102,04%	113,37
8	Balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	90%	76,85%	85,38
9	Balita memperoleh imunisasi dasar lengkap	90%	100,89%	112,1
10	Penduduk menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	100%	100%	100
11	Desa/Kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	90%	52,71%	58,56
12	Target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas	70%	87,5%	125

**Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Banten**


Dr. dr. Hj. ATI PRAMUDJI HASTUTI, MARS
NIP.197308152003122005

RASIO KEMATIAN IBU DAN BAYI
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kematian Ibu Januari-Desember	Jumlah Kelahiran Hidup	Rasio Kematian Ibu
1	Kabupaten Pandeglang	28	24342	115.03
2	Kabupaten Lebak	30	23685	126.66
3	Kabupaten Tangerang	34	58233	58.39
4	Kabupaten Serang	33	35140	93.91
5	Kota Tangerang	7	38745	18.07
6	Kota Cilegon	6	8228	72.92
7	Kota Serang	20	11672	171.35
8	Kota Tangerang Selatan	5	27851	17.95
	Provinsi Banten	163	227896	71.52

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kematian Bayi Januari-Desember	Jumlah Kelahiran Hidup	Rasio Kematian Bayi
1	Kabupaten Pandeglang	129	24342	5.30
2	Kabupaten Lebak	276	23685	11.65
3	Kabupaten Tangerang	214	58233	3.67
4	Kabupaten Serang	204	35140	5.81
5	Kota Tangerang	37	38745	0.95
6	Kota Cilegon	76	8228	9.24
7	Kota Serang	75	11672	6.43
8	Kota Tangerang Selatan	15	27851	0.54
	Provinsi Banten	1026	227896	4.50

Kepala Dinas Kesehatan
 Provinsi Banten



Dr.dr.Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS
 Pembina Utama Madya/ IV d
 NIP. 197308152002122005

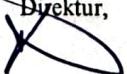
PENJELASAN
HASIL KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PROVINSI BANTEN
DARI UPTD RSUD BANTEN

	Indikator Kinerja Utama	Target 2024 (PK Perubahan)	Realisasi	Capaian	Predikat
5	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	92,31	92,31	100%	Istimewa
Capaian Kinerja PD akhir Tahun				Istimewa	

1. Hasil Capaian Kinerja Tahunan dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Banten UPTD RSUD Banten Tahun 2024 adalah 100% dengan predikat ISTIMEWA dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Dasar pententuan indikator adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 93 Tahun 2015 tentang RS Pendidikan (Pasal 18).
 - b. Terdapat 13 indikator dasar perhitungan tercapainya kinerja , yaitu :
 - 1) Telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan mampu menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah sesuai dengan kebutuhan Pendidikan;
 - 2) Memiliki izin operasional yang masih berlaku;
 - 3) Terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan Institusi Pendidikan;
 - 5) Terdapat pernyataan kesediaan menjadi Rumah Sakit Pendidikan dari Pemilik RS;
 - 6) Memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sebagai dosen kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sesuai perundang-undangan yang berlaku;
 - 7) Standar Visi, Misi Komitmen RS di bidang Pendidikan;
 - 8) Standar manajemen dan administrasi Pendidikan;
 - 9) Standar sumber daya manusia;
 - 10) Standar sarana penunjang Pendidikan;
 - 11) Standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas;
 - 12) Memiliki program penelitian secara rutin.
 - 13) Memiliki teknologi kedokteran dan/atau kesehatan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tenaga kesehatan;
 - c. Dari 13 Indikator tersebut pada tahun 2024 ini terdapat indikator yang sudah tercapai 12 indikator dengan perhitungannya yaitu : $12/13 \times 100\% = 92.31\%$

Demikian penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Serang, 07 Januari 2025

Direktur,


dr. Danang Hamsah Nugroho, M.Kes
 Nip. 197307022005011003

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
UPT RSUD MALINGPING

No.	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan	Percentase	Keterangan
1	Percentase ketercapaian indikator SPM Rumah Sakit	100%	100%	$\frac{\sum \text{indikator SPM RS yang tercapai}}{\sum \text{variabel indikator standar SPM RS}} \times 100 \%$	100%	Direktur
2	Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100%	100%	$\frac{\sum \text{capaian indikator SPM pelayanan medis}}{\sum \text{variabel indikator SPM pelayanan medis}} \times 100 \%$	100%	Kepala Bidang Pelayanan
3	Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100%	100%	$\frac{\sum \text{capaian indikator SPM keperawatan}}{\sum \text{variabel indikator SPM keperawatan}} \times 100 \%$	100%	Kepala Bidang Keperawatan
4	Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100%	100%	$\frac{\sum \text{capaian indikator SPM penunjang}}{\sum \text{variabel indikator SPM penunjang}} \times 100 \%$	100%	Kepala Bidang Penunjang

Malingping, 31 Desember 2024

Plh. Direktur



NIP. 19790830 200604 2 014

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
UPT RSUD MALINGPING

No.	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan	Percentase	Keterangan
1	Percentase ketercapaian indikator SPM Rumah Sakit	100%	100%	$\frac{\sum \text{indikator SPM RS yang tercapai}}{\sum \text{variabel indikator standar SPM RS}} \times 100 \%$	100%	Direktur
2	Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100%	100%	$\frac{\sum \text{capaian indikator SPM pelayanan medis}}{\sum \text{variabel indikator SPM pelayanan medis}} \times 100 \%$	100%	Kepala Bidang Pelayanan
3	Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100%	100%	$\frac{\sum \text{capaian indikator SPM keperawatan}}{\sum \text{variabel indikator SPM keperawatan}} \times 100 \%$	100%	Kepala Bidang Keperawatan
4	Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100%	100%	$\frac{\sum \text{capaian indikator SPM penunjang}}{\sum \text{variabel indikator SPM penunjang}} \times 100 \%$	100%	Kepala Bidang Penunjang

Malingping, 31 Desember 2024

Plh. Direktur



NIP. 19790830 200604 2 014

REKAPITULASI MONITORING STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024 (SESUAI PERMENKES NOMOR 129 TAHUN 2008)

BIDANG PELAYANAN MEDIS

NO	INDIKATOR MUTU	NUMERATOR	BULAN												JUMLAH	%	STANDAR	PENCAPAIAN					
		DENUMERATOR	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER									
1. ETIKA DAN MUTU PELAYANAN MEDIS																							
A. Pelayanan Bedah																							
1	Penundaan Operasi Elektif	Jumlah waktu tunggu operasi terencana ≤ 2 hari dari seluruh pasien yang dioperasi elektif dalam 1 bulan	33	48	78	67	35	73	122	164	124	153	145	40	1082	100%	100%	100%					
		Jumlah seluruh pasien yang dioperasi yang terencana dalam 1 bulan	33	48	78	67	35	73	122	164	124	153	145	40	1082								
2	Kejadian kematian di meja operasi	Jumlah pasien yang meninggal dimeja operasi dalam satu bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	≤ 1 %	100%					
		Jumlah pasien yang dilakukan tindakan pembedahan dalam satu bulan	157	185	221	220	201	227	297	335	310	357	311	85	2906								
3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	Jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu satu bulan dikurangi jumlah pasien yang dioperasi salah sisi dalam waktu satu bulan	157	185	221	220	201	227	120	335	310	357	311	85	2729	100%	100%	100%					
		Jumlah pasien yang dioperasi dalam satu bulan	157	185	221	220	201	227	120	335	310	357	311	85	2729								

4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	Jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu satu bulan dikurangi jumlah pasien yang dioperasi salah orang dalam waktu satu bulan	157	185	221	220	201	227	297	335	310	357	311	85	2906	100%	100%	100%
		Jumlah pasien yang dioperasi dalam satu bulan	157	185	221	220	201	227	297	335	310	357	311	85	2906			
5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	Jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu satu bulan dikurangi jumlah pasien yang mengalami salah tindakan operasi dalam waktu satu bulan	157	185	221	220	201	227	297	335	310	357	311	85	2906	100%	100%	100%
		Jumlah pasien yang dioperasi dalam satu bulan	157	185	221	220	201	227	297	335	310	357	311	85	2906			
6	Tidak adanya kejadian tertinggal benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	Jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu satu bulan dikurangi jumlah pasien yang mengalami tertinggal benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	157	185	221	220	201	227	297	335	310	357	311	85	2906	100%	100%	100%
		Jumlah pasien yang dioperasi dalam satu bulan	157	185	221	220	201	227	297	335	310	357	311	85	2906			
7	Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube	Jumlah pasien yang mengalami komplikasi anastesi dalam satu bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	≤ 5 %	100%
		Jumlah pasien yang dioperasi dalam satu bulan	157	185	221	220	201	227	297	335	310	357	311	85	2906			

B. Perawatan Intensif																	
1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	Jumlah pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam dalam 1 bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0% ≤ 3% 100%
	Jumlah seluruh pasien yang dirawat di ruang intensif dalam 1 bulan	39	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	10	365			
2	Pemberi pelayanan unit intensif (Dokter Sp. Anastesi dan dokter spesialis)	Jumlah tenaga dokter Sp.An dan spesialis yang sesuai dengan kasus yang ditangani	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	100% 100% 100%	
	Jumlah seluruh tenaga dokter yang melayani perawatan intensif	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252		
C. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi																	
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan (Perdarahan)	Jumlah kematian pasien persalinan karena perdarahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0% 1% 100%	
	Jumlah pasien-pasien persalinan dengan perdarahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Kejadian kematian ibu karena persalinan (Pre-eklamsia/eklamsia)	Jumlah kematian pasien persalinan karena pre-eklamsia/eklamsia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0% ≤30% 100%	
	Jumlah pasien-pasien persalinan dengan pre-eklamsia/eklamsia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3	Kejadian kematian ibu karena persalinan (sepsis)	Jumlah kematian pasien persalinan karena sepsis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	≤0,2%	100%	
		Jumlah pasien-pasien persalinan dengan sepsis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Pemberi pelayanan persalinan normal	Jumlah tenaga dokter Sp.OG, dokter umum terlatih (asuhan persalinan normal) dan bidan yang memberikan pertolongan persalinan	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312	100%	100%	100%	
		Jumlah seluruh tenaga yang memberi pertolongan persalinan	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312				
5	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	Jumlah tenaga dokter Sp.OG, dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesi yang memberikan pertolongan persalinan dengan tindakan operasi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	100%	100%	100%	
		Jumlah seluruh tenaga yang melayani persalinan dengan tindakan operasi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72				
6	Kemampuan manangani BBLR 1500 gr-2500 gr	Jumlah BBLR 1500 gr-2500 gr yang berhasil ditangani	18	20	16	25	27	32	26	24	30	24	23	5	270	100%	100%	100%
		Jumlah seluruh BBLR 1500 gr- 2500gr yang ditangani	18	20	16	25	27	32	26	24	30	24	23	5	270			

7	Pertolongan persalinan melalui sekso cesaria	Jumlah persalinan dengan sekso cesaria dalam 1 bulan	64	47	55	89	95	86	99	93	115	105	92	16	956	19%	≤ 20%	100%
		Jumlah seluruh persalinan dalam 1 bulan	68	50	59	96	102	92	104	99	115	109	94	17	1005			

2. PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN KERJASAMA

A. Perawatan Intensif

1	Pemberi pelayanan unit intensif (100% Perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara D4	Jumlah tenaga perawat D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara yang melayani pelayanan perawatan intensif	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	100%	100%	100%
		Jumlah seluruh tenaga perawatan yang melayani perawatan intensif	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180			

C. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi

1	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tersedianya tim PONEK terlatih (dokter Sp.OG, Sp.A, dokter umum, bidan dan perawat)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100%	100%	100%
		Tersedianya tim PONEK terlatih (dokter Sp.OG, Sp.A, dokter umum, bidan dan perawat)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60			
2	Keluarga Berencana	Jenis pelayanan KB mantap	9	5	5	6	6	5	4	5	10	5	5	0	65	100%	100%	97%
		Jumlah peserta KB	11	5	5	6	6	5	4	5	10	5	5	0	67			

3	Konseling KB Mantap	Jumlah konseling pelayanan KB mantap	11	5	5	6	6	5	5	5	10	5	5	0	68	100%	100%	100%
		Jumlah peserta KB mantap	9	5	5	6	6	5	5	5	10	5	5	0	66			
4	Kepuasan Pelanggan	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei (dalam prosen)	95,75	84,19	85,6	88,5	90,3	90,1	90,7	90,5	91,4	90,7	90,1	92	1079,84	80,0%	80%	100%
		Jumlah total pasien yang disurvei (n= minimal 50)	54	57	55	65	68	61	55	50	52	53	54	51	675			
TOTAL																100%		

Malingping, Desember 2024

Plh. Direktur RSUD Malingping

Kepala Bidang Pelayanan Medis

dr. Olivia Putri Perdana, Sp.M
NIP. 19770520 200604 2 007

dr. Rr. Sulestiorini
NIP. 19790830 200604 2 014

REKAPITULASI MONITORING STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SESUAI PERMENKES NO. 129/Menkes/SK/II/2008)
BIDANG PENUNJANG RSUD MALINGPING TAHUN 2024
TRIWULAN IV

No	Indikator Mutu	Numerator	Bulan												Jumlah	%	Standar	Pencapaian	
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember					
A. PELAYANAN RADIOLOGI																			
1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan thorax foto ≤ 3 jam dalam satu bulan	867,0	790,0	815,0	889,0	818,0	695,0	973,0	973,0	898,0	1,095,0	7,662,5	3,029,7	19,505,2	190%	100%	100%	
		Jumlah pasien foto thorax dalam sebuah bulan	867,0	790,0	815,0	889,0	818,0	695,0	973,0	973,0	898,0	1,095,0	832,0	633,0	10,278,0				
2	Pelaksana eksperitse	Jumlah foto rontgen yang di eksperitse dalam satu bulan	1,470,0	1,295,0	1,273,0	1,369,0	1,403,0	1,197,0	1,613,0	1,604,0	1,557,0	1,913,0	1,597,0	1,130,0	17,421,0		100%	100% dieksperitse radiologi	100%
		Jumlah seluruh pemeriksaan radiologi dalam satu bulan	1,470,0	1,295,0	1,273,0	1,369,0	1,403,0	1,197,0	1,613,0	1,604,0	1,557,0	1,913,0	1,597,0	1,130,0	17,421,0				
3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	Jumlah foto rusak yang tidak dapat dibaca dalam 1bulan	14,0	6,0	11,0	16,0	9,0	9,0	11,0	8,0	11,0	19,0	16,0	16,0	146,0	0.92%	≤ 1%	100%	
		Jumlah seluruh pemeriksaan radiologi dalam satu bulan	1,283,0	1,137,0	1,148,0	1,177,0	1,252,0	1,197,0	1,438,0	1,456,0	1,360,0	1,701,0	1,360,0	1,360,0	15,869,0				
4	Kepuasan pelanggan	Jumlah pasien Radiologi yang merasa puas	81,0	82,0	84,0	93,0	90,0	95,0	113,0	111,0	96,0	102,0	57,0	86,0	1,090,0	99.8%	90%	100%	
		Jumlah seluruh pasien Radiologi yang disurvei	81,0	83,0	85,0	93,0	90,0	95,0	113,0	111,0	96,0	102,0	57,0	86,0	1,092,0				
TOTAL PENCAPAIAN																		100.0%	
B. PELAYANAN FARMASI																			
1	Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi	Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat jadi pasien yang disurvei dalam satu bulan	126,792,0	108,009,0	44,499,0	64,399,0	39,457,0	39,218,0	30,857,0	23,206,0	34,835,0	35,059,0	25,338,0	22,443,0	594,112,0	14,00	≤ 25	100%	
		Jumlah pasien yang di survei dalam satu bulan	3,968,0	3,473,0	2,834,0	3,378,0	3,153,0	3,683,0	3,988,0	3,441,0	4,350,0	4,253,0	3,939,0	1,966,0	42,426,0				
2	Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan	Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat racikan pasien yang disurvei dalam satu bulan	8,374,0	13,466,0	5,167,0	3,864,0	3,279,0	2,314,0	1,465,0	1,225,0	1,397,0	877,0	1,924,0	719,12	44,071,1	16,55	≤ 90	100%	
		Jumlah pasien yang di survei dalam satu bulan	251,0	379,0	262,0	248,0	228,0	209,0	202,0	206,0	208,0	67,0	306,0	97,00	2,663,0				
3	Tidak adanya Kejadian Kesalahan Pemberian Obat	Jumlah seluruh pasien instalasi farmasi dikurangi jumlah pasien yang mengalami kesalahan pemberian obat	15,253,0	15,113,0	15,457,0	14,232,0	15,429,0	14,339,0	16,459,0	16,771,0	15,935,0	17,475,0	15,342,0	4,960,00	176,765,0	100%	100%	100%	
		Jumlah seluruh pasien Instalasi Farmasi	15,253,0	15,113,0	15,457,0	14,232,0	15,429,0	14,339,0	16,459,0	16,771,0	15,935,0	17,475,0	15,342,0	4,960,00	176,765,0				
4	Penulisan resep formularium	Jumlah resep yang diambil sebagai sampel yang sesuai formularium dalam satu bulan	350,0	412,0	375,0	395,0	309,0	377,0	362,0	360,0	385,0	372,0	347,0	172,00	4,216,0	100%	100%	100%	
		Jumlah seluruh resep yang diambil sebagai sampel dalam satu bulan	350,0	412,0	375,0	395,0	309,0	377,0	362,0	360,0	385,0	372,0	347,0	172,00	4,216,0				
TOTAL PENCAPAIAN																		100.0%	
C. INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK																			
1	Waktu Tunggu Pelayanan Hasil Laboratorium	Rekap kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium pasien yang di survei dalam satu bulan (menit)	116,0	123,0	119,0	117,0	118,0	117,0	118,0	119,0	119,0	125,0	121,0	119,0	1,431,0	19,40	≤ 120 menit	100%	
		Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium dalam satu bulan	2,249,0	2,567,0	2,229,0	2,060,0	2,199,0	1,963,0	2,563,0	2,511,0	2,472,0	2,631,0	2,292,0	2,030,0	27,766,0				
2	Pelaksana Eksperitse	Jumlah seluruh laboratorium yang di verifikasi hasilnya oleh dokter spesialis Patologi klinik dalam satu bulan	11,529,0	14,678,0	12,411,0	11,355,0	12,491,0	12,715,0	13,711,0	13,987,0	13,747,0	15,413,0	13,512,0	11,324,0	156,873,0	99%	dr. Sp.PK	100%	
		Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium dalam satu bulan	11,529,0	14,678,0	12,411,0	11,355,0	12,491,0	12,715,0	13,711,0	13,987,0	13,747,0	15,413,0	13,512,0	12,968,0	158,517,0				
3	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	Jumlah penerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	100%	100%	
		Jumlah seluruh hari pelayanan rawat jalan spesialistik dalam satu bulan	31,0	29,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0	31,0	366,0				
TOTAL PENCAPAIAN																		100.0%	
D. INSTALASI GIZI																			
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	Jumlah pasien rawat inap yang disurvei yang mendapat makanan tepat waktu dalam satu bulan	24,0	15,0	18,0	55,0	379,0	320,0	551,0	455,0	400,0	460,0	400,0	300,0	3,377,0	100%	100%	100%	
		Jumlah seluruh pasien rawat inap yang disurvei	24,0	15,0	18,0	55,0	379,0	320,0	551,0	455,0	400,0	460,0	400,0	300,0	3,377,0				
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	Jumlah Kumulatif porsi sisa makanan dari pasien yang disurvei	26,5	35,5	35,5	26,3	25,5	20,7	40,0	27,6	23,4	31,6	16,7	10,6	319,7	19,86%	< 25%	100%	
		Jumlah pasien yang disurvei dalam satu bulan	138,0	155,0	145,0	125,0	144,0	119,0	188,0	150,0	122,0	176,0	83,0	65,0	1,610,0				
3	Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet	Jumlah pemberian makanan yang disurvei dikurangi jumlah pemberian makanan yang salah diet	75,0	62,0	66,0	58,0	379,0	320,0	551,0	455,0	400,0	460,0	400,0	300,0	3,526,0	100%	100%	100%	
		Jumlah pasien yang disurvei dalam satu bulan	75,0	62,0	66,0	58,0	379,0	320,0	551,0	455,0	400,0	460,0	400,0	300,0	3,526,0				
TOTAL PENCAPAIAN																		100.0%	

REKAPITULASI MONITORING STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SESUAI PERMENKES NO. 129/Menkes/SK/II/2008)
BIDANG PENUNJANG RSUD MALINGPING TAHUN 2024
TRIWULAN IV

REKAPITULASI MONITORING STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SESUAI PERMENKES NO. 129/Menkes/SK/II/2008)
BIDANG PENUNJANG RSUD MALINGPING TAHUN 2024
TRIWULAN IV

No	Indikator Mutu	Numerator Denumerator	Bulan												Jumlah	%	Standar	Pencapaian	
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember					
I. Pelayanan PPI																			
1	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Jumlah anggota tim PPI yang sudah terlatih	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	192.0	100%	75%	100%	
		Jumlah anggota Tim PPI	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	192.0				
2	Tersedia APD di setiap instalasi departemen	Jumlah instalasi yang menyediakan APD	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	192.0	100%	80%	100%	
		Jumlah instalasi di rumah sakit	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	192.0				
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI	Jumlah instalasi yang melakukan pencatatan dan pelaporan	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	192.0	100%	95%	100%	
		Jumlah instalasi yang tersedia	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	192.0				
TOTAL PENCAPAIAN																100.0%			
TOTAL PENCAPAIAN KESELURUHAN																100.0%			

Mengetahui,
Pih. Direktur RSUD Malingping

dr.RR. Sulestiorini
NIP. 19790830 2006042014

Malingping, Desember 2024
Kepala Bidang Penunjang

Endat Sudrajat, SE, M.Si
NIP. 19671001 198703 1 004

REKAPITULASI MONITORING STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SESUAI PERMENKES NO. 129/Menkes/SK/II/2008)
BIDANG KEPERAWATAN TRIWULAN IV 2024

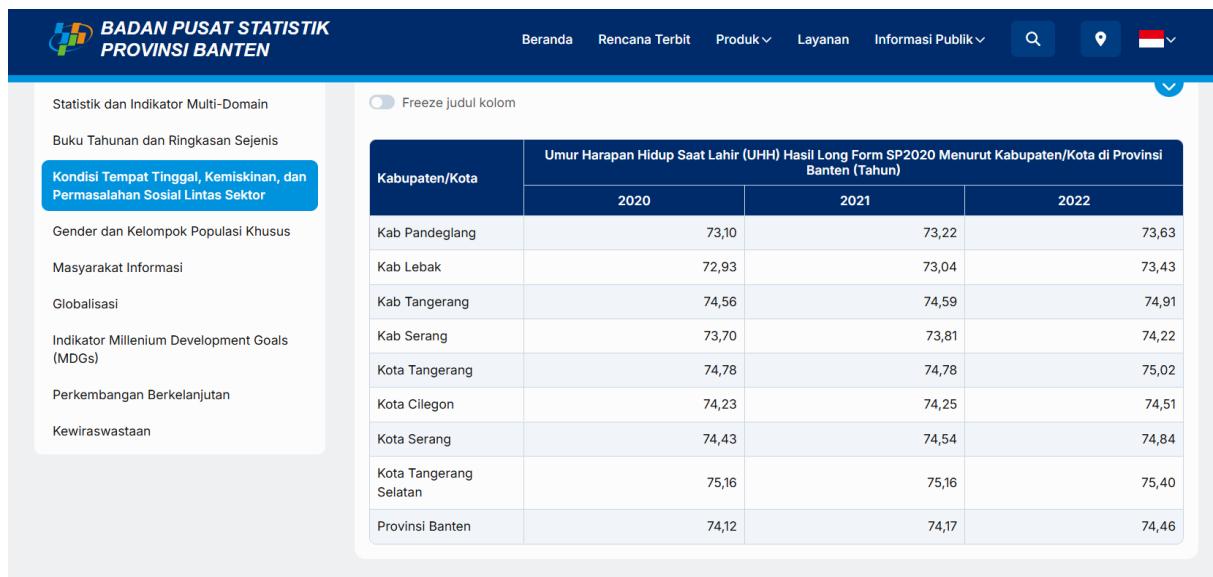
NO	INDIKATOR MUTU	NUMERATOR	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER (Tanggal 1-16)	JUMLAH	HASIL	STANDAR	PENCAPAIAN (%)
		DENUMERATOR							
A. Pelayanan Rawat Jalan									
1	Pemberi pelayanan di klinik spesialis	Jumlah hari buka klinik spesialis yang ditangani oleh dokter spesialis dalam waktu satu bulan	231	208	108	547	92,71	100%	92,71
		Jumlah seluruh hari buka klinik spesialis dalam waktu satu bulan	258	221	111	590			
2	Ketersediaan pelayanan rawat jalan	Jenis-jenis pelayanan rawat jalan spesialistik yang ada	4	4	4	12	100,00	100%	100,00
		Jenis-jenis pelayanan rawat jalan spesialistik yang harus ada (Anak, penyakit dalam, kебиданan dan bedah)	4	4	4	12			
3	Ketersediaan pelayanan rawat jalan jiwa di Rumah Sakit	Jenis-jenis pelayanan rawat jalan spesialistik jiwa yang ada di RS	4	4	4	12	100,00	100%	100,00
		Jenis- jenis pelayanan rawat jalan spesialistik jiwa yang ada (minimal, NAPZA, Gangguan Psikotik, Gangguan organik, gangguan psikotik)	4	4	4	12			
4	Jam Buka Pelayanan	Jumlah pelayanan rawat jalan spesialistik yang buka sesuai ketentuan dalam satu bulan	231	221	108	560	97,05	100%	97,05
		Jumlah seluruh hari pelayanan rawat jalan spesialistik dalam satu bulan	258	208	111	577			
5	Waktu tunggu di Rawat Jalan	Jumlah kumulatif waktu tunggu pasien rawat jalan yang disurvei	17255	16191	8299	41745	76,32	≤ 60 menit	78,62
		Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang disurvei	231	208	108	547			
6	Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan	Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien rawat jalan yang disurvei	81,02	87,48	86,06	254,56	84,85	90%	94,28
		Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang disurvei (minimal n = 50)	139	200	214	553			
7	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan TCM	Jumlah Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan TCM			435	435	83,49	≥ 60%	139,16
		Jumlah seluruh pasien rawat jalan tuberculosis yang ditangani di rumah sakit			521	521			
8	Telaksana Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan TB di RS	Jumlah semua pasien rawat jalan tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS			119	87	22,37	≥ 60%	37,28
		Jumlah seluruh pasien rawat jalan tuberculosis yang ditangani di rumah sakit			521	389			
B. Pelayanan Rawat Inap									
1	Pemberi pelayanan di rawat inap	Jumlah tenaga dokter dan perawat yang memberi pelayanan di ruang rawat inap yang sesuai dengan ketentuan (dokter spesialis & D3 Keperawatan)	74	74	74	222	100,00	100%	100,00
		Jumlah seluruh tenaga dokter dan perawat yang bertugas di rawat inap	74	74	74	222			
2	Dokter penanggungjawab pasien rawat inap	Jumlah pasien yang mempunyai DPJP	789	693	324	1806	100,00	100%	100,00
		Jumlah seluruh pasien rawat inap dalam satu bulan	789	693	324	1806			
3	Ketersediaan pelayanan rawat inap	Jenis – jenis pelayanan rawat inap spesialistik yang ada	4	4	4	12	100,00	100%	100,00
		Jenis – jenis pelayanan rawat inap spesialistik yang harus ada (Anak, Bedah, Penyakit Dalam, Kebidanan)	4	4	4	12			
4	Visite Dokter Spesialis	Jumlah visite dokter spesialis antara jam 08.00 sampai dengan 14.00	302	224	133	659	80,76	100%	80,76
		Jumlah pelaksanaan visite dokter spesialis dalam satu bulan	380	261	175	816			
5	Kejadian infeksi pasca operasi	Jumlah pasien yang mengalami infeksi pasca operasi dalam satu bulan	0	1	0	1	0,31	≤ 1,5%	100,00
		Jumlah seluruh pasien yang dioperasi dalam satu bulan	136	133	56	325			
6	Kejadian infeksi nosocomial/ HALs	Jumlah pasien rawat inap yang terkena infeksi nosokomial/HALs dalam satu bulan	33	19	13	65	1,10	≤ 1,5%	100,00
		Jumlah hari pemasangan alat/jumlah hari rawat inap dalam satu bulan	2368	2254	1312	5934			
7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	Jumlah pasien dirawat dalam bulan tersebut dikurangi jumlah pasien yang jatuh dan berakibat kecacatan atau kematian	789	693	324	1806	100,00	100%	100,00
		Jumlah seluruh pasien rawat inap dalam satu bulan	789	693	324	1806			
8	Kematian pasien > 48 jam	Jumlah kejadian kematian pasien rawat inap > 48 jam dalam satu bulan	7	13	5	25	1,38	≤ 0,24%	98,46
		Jumlah seluruh pasien rawat inap dalam satu bulan	789	693	324	1806			
9	Kejadian Pulang Paksa	Jumlah pasien pulang paksa dalam satu bulan	30	25	22	77	4,65	≤ 5%	95,35
		Jumlah seluruh pasien rawat inap dalam satu bulan	639	693	324	1656			
10	Kepuasan Pelanggan	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan pasien yang disurvei (dalam persen)	90,03	96,50	90,42	276,95	92,32	90%	102,57
		Jumlah total pasien yang disurvei	463	242	215	920			
11	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	Jumlah Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	41	27	21	89	72,36	≥ 60%	166,67
		Jumlah pasien TB dalam satu bulan	56	38	29	123			
12	Terlaksana kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	Pasien rawat inap dengan TB yang ditangani dengan strategis DOTS dalam satu bulan	56	38	29	123	100,00	≥ 60%	166,67
		Jumlah pasien TB dalam satu bulan	56	38	29	123			
TOTAL PENCAPAIAN SPM BIDANG KEPERAWATAN									100

Malingping, Desember 2024
 Kepala Bidang Keperawatan


 dr. Sobran Yulindra, MPH
 NIP.19700713 200701 1 012

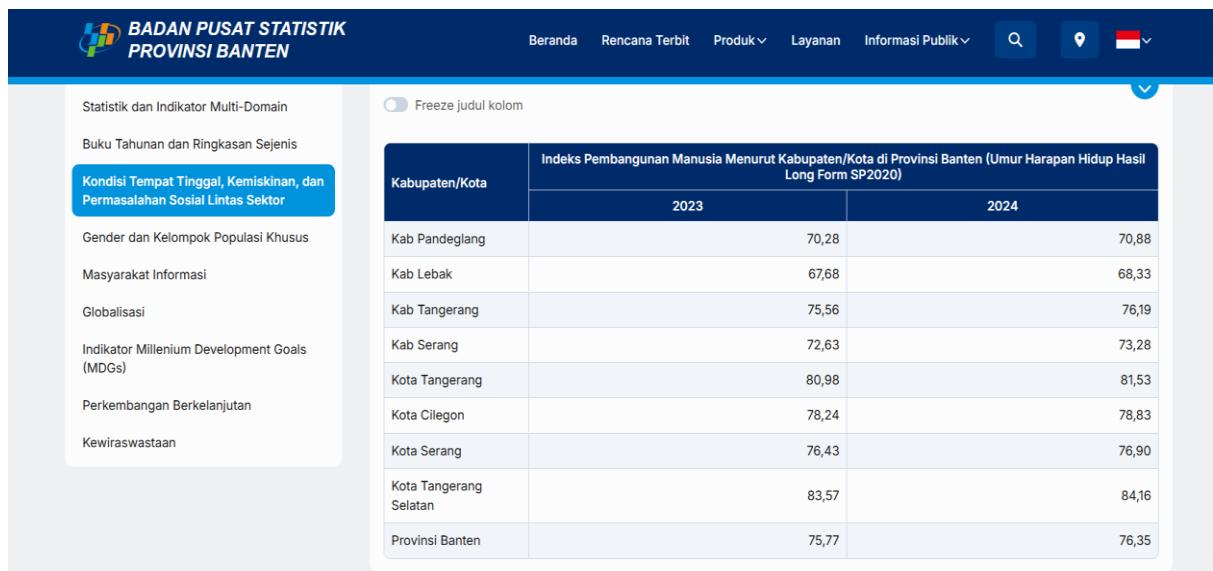
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Hasil Long Form SP2020 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)

Sumber: banten.bps.go.id



The screenshot shows a table titled "Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Hasil Long Form SP2020 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)". The table has three columns: 2020, 2021, and 2022. The data is as follows:

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Hasil Long Form SP2020 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)		
	2020	2021	2022
Kab Pandeglang	73,10	73,22	73,63
Kab Lebak	72,93	73,04	73,43
Kab Tangerang	74,56	74,59	74,91
Kab Serang	73,70	73,81	74,22
Kota Tangerang	74,78	74,78	75,02
Kota Cilegon	74,23	74,25	74,51
Kota Serang	74,43	74,54	74,84
Kota Tangerang Selatan	75,16	75,16	75,40
Provinsi Banten	74,12	74,17	74,46



The screenshot shows a table titled "Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020)". The table has three columns: 2023, 2024, and 2024. The data is as follows:

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020)	
	2023	2024
Kab Pandeglang	70,28	70,88
Kab Lebak	67,68	68,33
Kab Tangerang	75,56	76,19
Kab Serang	72,63	73,28
Kota Tangerang	80,98	81,53
Kota Cilegon	78,24	78,83
Kota Serang	76,43	76,90
Kota Tangerang Selatan	83,57	84,16
Provinsi Banten	75,77	76,35

PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH DINAS KESEHATAN TAHUN 2024



**Penghargaan Piala Medis
dan Tenaga Kesehatan
Teladan Serta Kader
Berprestasi Tingkat
Nasional Th 2024**



**Tangerang raya award OPD
Inovatif bidang kesehatan**

Pengurus barang terbaik dalam pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2024



Poster Terbaik (Terapi Pencegahan TBC Th 2024) 9 Juli 2024



Rumah Sakit Swasta Terbaik (Implementasi dan Capaian Indikator TBC Th 2023)

